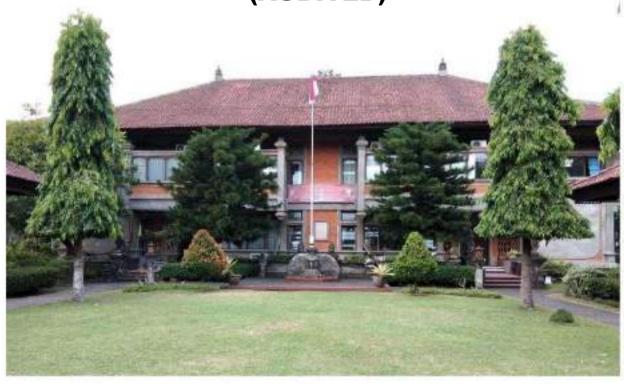


PEMERINTAH PROVINSI BALI LAPORAN KEUANGAN SKPD (AUDITED)



DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Perangkat Daerah (PD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan Akuntabilitas Publik dan telah diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali.

Bali, 7 Mei 2023. Kepala Dinas Pariwisata

TIS ATT

Provinsi Bali

PARI

Tjok Bagus Pemayun, A.Par,MM. Pembina Tk.I

Pembina ik.i

NIP. 19660907 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i	İ
DAFTAR ISI i	ii-iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
NERACA	2
LAPORAN OPERASIONAL	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	2
BAB I PENDAHULUAN	4
Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD	4
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	4
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD.	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIA	N
TARGET KINERJA APBD	7
2.1. Ekonomi Makro	7
Kebijakan Keuangan	17
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	23
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja	
Keuangan SKPD	25

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian	
target yang telah ditetapkan	25
Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD	25
BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI	26
4.1 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	27
Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuang	an
SKPD	27
Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan	
Laporan Keuangan SKPD	28
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan	
Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi	
Pemerintah pada SKPD	30
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	70
Laporan Realisasi Anggaran	70
Laporan Operaional	72
Neraca	74
Laporan Perubahan Ekuitas	81
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN DARI PENGUNGKAPAN LAINNYA LAMPIRAN – LAMPIRAN	83

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI 3.26.0.00.0.00.01. - DINAS PARIWISATA N E R A C A

PER 31Desember2022 DAN 2021

Halaman 1 dari 1

	Jumlah	(Rp)
Uraian	2022	2021
1	2	3
ASET	7.430.609.090,00	7.410.977.764,00
ASET LANCAR	31.867.523,00	115.323.336,00
Persediaan	31.867.523,00	115.323.336,00
ASET TETAP	7.398.741.567,00	7.295.654.428,00
Tanah	6.155.360.000,00	6.155.360.000,00
Peralatan dan Mesin	3.231.507.792,00	3.360.491.620,00
Gedung dan Bangunan	1.493.928.545,00	1.277.838.900,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	190.834.765,00	165.198.205,00
Aset Tetap Lainnya	45.232.000,00	45.232.000,00
Akumulasi Penyusutan	(3.718.121.535,00)	(3.708.466.297,00)
Aset Lain-lain	11.578.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(11.578.000,00)	0,00
JUMLAH ASET	7.430.609.090,00	7.410.977.764,00
KEWAJIBAN	457.733.905,00	480.982.232,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	457.733.905,00	480.982.232,00
Utang Belanja	457.733.905,00	480.982.232,00
JUMLAH KEWAJIBAN	457.733.905,00	480.982.232,00
EKUITAS	6.972.875.185,00	6.929.995.532,00
EKUITAS.	6.972.875.185,00	6.929.995.532,00
Ekuitas	(6.631.644.959,00)	6.929.995.532,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	13.604.520.144,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	6.972.875.185,00	6.929.995.532,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.430.609.090,00	7.410.977.764,00

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

PARIVISATA I

Tjok bagus Pemayun. APar.MM NIP. 196609071999031004

PEMERINTAH PROVINSI BALI 3.26.0.00.0.00.01. - DINAS PARIWISATA N E R A C A

PER 31Desember2022 DAN 2021

Halaman 1 dari 4

	Jumlah (Rp)	
Uraian	Uraian 2022 20	
1	2	3
ASET	7.430.609.090,00	7.410.977.764,00
ASET LANCAR	31.867.523,00	115.323.336,00
Persediaan	31.867.523,00	115.323.336,00
Barang Pakai Habis	31.867.523,00	115.323.336,00
Bahan	4.093.000,00	82.756.500,00
Bahan Bakar dan Pelumas	4.093.000,00	82.756.500,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	27.774.523,00	26.172.086,00
Alat Tulis Kantor	21.687.879,00	14.162.717,00
Kertas dan Cover	3.054.244,00	5.688.000,00
Benda Pos	2.136.000,00	3.327.000,00
Bahan Komputer	0,00	977.300,00
Alat Listrik	669.200,00	1.449.069,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	227.200,00	568.000,00
Obat-obatan	0,00	56.000,0
Obat-obatan Lainnya	0,00	56.000,0
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	6.338.750,0
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	6.338.750,00
ASET TETAP	7.398.741.567,00	7.295.654.428,00
Tanah	6.155.360.000,00	6.155.360.000,0
Tanah.	6.155.360.000,00	6.155.360.000,00
Tanah Persil	6.155.360.000,00	6.155.360.000,0
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.155.360.000,00	6.155.360.000,0
Peralatan dan Mesin	3.231.507.792,00	3.360.491.620,0
Alat Angkutan	1.752.766.420,00	1.764.344.420,0
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.752.766.420,00	1.764.344.420,0
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.732.209.420,00	1.554.259.420,0
Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	177.950.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.557.000,00	32.135.000,0
Alat Kantor dan Rumah Tangga	821.597.172,00	880.534.900,0
Alat Kantor	264.346.100,00	270.556.100,0
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	201.630.000,00	203.880.000,0
Alat Kantor Lainnya	62.716.100,00	66.676.100,0
Alat Rumah Tangga	557.251.072,00	609.978.800,00
Mebel	158.443.172,00	158.620.000,0
Alat Pembersih	7.300.000,00	7.300.000,0
Alat Pendingin	231.429.300,00	254.088.800,0
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	160.078.600,00	189.970.000,0
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	56.347.300,00	72.958.000,00
Alat Studio	36.389.300,00	53.000.000,00
Peralatan Studio Audio	2.533.700,00	0,00
Peralatan Studio Video dan Film	33.855.600,00	

Uraian Jumlah (Rp)		(Rp)
	2022	2021
1	2	3
Alat Komunikasi	19.958.000,00	19.958.000,00
Alat Komunikasi Telephone	19.958.000,00	19.958.000,00
Komputer	600.796.900,00	642.654.300,0
Komputer Unit	437.946.800,00	472.246.800,0
Personal Komputer	437.946.800,00	472.246.800,0
Peralatan Komputer	162.850.100,00	170.407.500,0
Peralatan Personal Komputer	130.025.600,00	137.583.000,0
Peralatan Jaringan	32.824.500,00	32.824.500,0
Gedung dan Bangunan	1.493.928.545,00	1.277.838.900,0
Bangunan Gedung	1.493.928.545,00	1.277.838.900,0
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.493.928.545,00	1.277.838.900,0
Bangunan Gedung Kantor	940.740.545,00	818.061.000,0
Bangunan Gudang	20.000.000,00	20.000.000,0
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	201.616.100,00	108.206.000,0
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	87.383.700,00	87.383.700,0
Bangunan Gedung Garasi/Pool	56.970.200,00	56.970.200,0
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	187.218.000,00	187.218.000,0
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	190.834.765,00	165.198.205,0
Jalan dan Jembatan	37.345.000,00	37.345.000,0
Jalan	37.345.000,00	37.345.000,0
Jalan Khusus	37.345.000,00	37.345.000,0
Bangunan Air	36.443.510,00	10.806.950,0
Bangunan Air Irigasi	36.443.510,00	10.806.950,0
Bangunan Pengambilan Irigasi	36.443.510,00	10.806.950,0
Instalasi	72.261.255,00	72.261.255,0
Instalasi Gardu Listrik	72.261.255,00	72.261.255,0
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	72.261.255,00	72.261.255,0
Jaringan	44.785.000,00	44.785.000,0
Jaringan Listrik	44.785.000,00	44.785.000,0
Jaringan Distribusi	44.785.000,00	44.785.000,0
Aset Tetap Lainnya	45.232.000,00	45.232.000,0
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	45.232.000,00	45.232.000,0
Barang Bercorak Kesenian	500.000,00	500.000,0
Lukisan	500.000,00	500.000,0
Alat Bercorak Kebudayaan	44.732.000,00	44.732.000,0
Barang Kerajinan	44.732.000,00	44.732.000,0
Akumulasi Penyusutan	(3.718.121.535,00)	(3.708.466.297,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.043.837.883,00)	(3.087.548.008,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.686.488.311,00)	(1.583.319.327,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	(1.665.931.311,00)	(1.373.234.327,00
Dinas Bermotor Perorangan Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	0,00	(177.950.000,00
Bermotor Penumpang Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	(20.557.000,00)	(32.135.000,00
Bermotor Beroda Dua Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(737.295.660,00)	(834.529.028,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(201.630.000,00)	(203.880.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(49.605.226,00)	(47.272.006,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(144.381.561,00)	(152.953.340,0
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(7.300.000,00)	(7.300.000,0
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(206.338.299,00)	(238.453.682,0
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(128.040.574,00)	(184.670.000,0
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(40.957.285,00)	(72.958.000,0
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(168.912,00)	0,
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(20.830.373,00)	(53.000.000,0
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(19.958.000,00)	(19.958.000,0
Akumulasi Penyusutan Komputer	(579.096.627,00)	(596.741.653,0
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Komputer	(422.143.511,00)	(438.951.987,0
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Komputer	(124.128.616,00)	(124.965.166,0
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(32.824.500,00)	(32.824.500,
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(570.910.905,00)	(524.884.721,
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(570.910.905,00)	(524.884.721,
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(342.577.267,00)	(306.008.035,
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	(3.366.667,00)	(2.966.667,
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung	(80.446.838,00)	(78.088.664, (9.489.329,
untuk Pos Jaga Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung	(42.822.600,00)	(41.683.196,
Garasi/Pool Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(90.393.190,00)	(82.904.470,
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	(3.744.360,
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(58.140.747,00)	(50.801.568,
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(32.676.875,00)	(28.942.375,
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(32.676.875,00)	(28.942.375,
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(2.443.657,00)	(1.765.135,
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi Akumulasi Penyusutan Instalasi	(2.443.657,00)	(1.765.135,
,	(10.989.736,00)	(9.183.204,
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(10.989.736,00)	(9.183.204
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(12.030.479,00)	(10.910.854,
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(12.030.479,00)	(10.910.854,
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(45.232.000,00)	(45.232.000,
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(45.232.000,00)	(45.232.000,
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(45.232.000,00)	(45.232.000,
Aset Lain-lain	11.578.000,00	O
Aset Lain-lain.	11.578.000,00	O
Aset Lain-lain	11.578.000,00	0
Aset Rusak Berat/Usang	11.578.000,00	C
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(11.578.000,00)	O
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.	(11.578.000,00)	O
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(11.578.000,00)	0
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(11.578.000,00)	0
JUMLAH ASET	7.430.609.090,00	7.410.977.764
WAJIBAN	457.733.905,00	480.982.232

Uraian	Uraian Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	457.733.905,00	480.982.232,00
Utang Belanja	457.733.905,00	480.982.232,00
Utang Belanja Pegawai	449.588.570,00	474.201.635,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15.921.120,00	14.590.261,00
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	1.656.202,00	1.688.905,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	947,00	0,00
Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN- luran Jaminan Kesehatan PNS	14.263.971,00	12.901.356,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	433.667.450,00	459.611.374,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	173.466.978,00	178.441.269,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Utang Belanja Barang dan Jasa	260.200.472,00 8.145.335,00	281.170.105,00 6.780.597,00
Utang Belanja Jasa	8.145.335,00	6.780.597,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	703.880,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	237.533,00	248.272,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.850.775,00	379.815,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	6.057.027,00	5.448.630,00
JUMLAH KEWAJIBAN	457.733.905,00	480.982.232,00
EKUITAS	6.972.875.185,00	6.929.995.532,00
EKUITAS.	6.972.875.185,00	6.929.995.532,00
Ekuitas	(6.631.644.959,00)	6.929.995.532,00
Ekuitas	6.929.995.532,00	6.929.995.532,00
Ekuitas	6.929.995.532,00	6.929.995.532,00
Ekuitas	6.929.995.532,00	6.929.995.532,00
Surplus/Defisit-LO	(13.562.854.666,00)	0,00
Surplus/Defisit-LO.	(13.562.854.666,00)	0,00
Surplus/Defisit-LO	(13.562.854.666,00)	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	1.214.175,00	0,00
Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD	3.214.175,00	0,00
Koreksi Nilai Pendapatan-LO	(2.000.000,00)	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	13.604.520.144,00	0,00
RK PPKD	13.604.520.144,00	0,00
RK PPKD.	13.604.520.144,00	0,00
RK PPKD	13.604.520.144,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	6.972.875.185,00	6.929.995.532,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.430.609.090,00	7.410.977.764,00

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Tjok bagus Pemayun. APar.MM NIP. 196609071999031004

DINAS PARIWISATA LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam rupiah)

			Kenaikan /	
URAIAN	2022	2021	Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN DAERAH-LO	176.020.000,00	0,00	176.020.000,00	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	ŕ	
PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	·	•
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	174.020.000,00	0,00	174.020.000,00	100,00
Pendapatan Hibah-LO	174.020.000,00	0,00	174.020.000,00	100,00
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	·	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	174.020.000,00 2.000.000,00	0,00	·	
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	·	•		
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan AsetNon Lancar-LO Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 0,00	100,00
Panjang-LO Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya - LO JUMLAH SURPLUS NON	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
OPERASIONAL-LO	,	,	,	Í
BEBAN DAERAH	13.738.874.666,00	0,00	13.738.874.666,00	100,00
BEBAN OPERASI	13.544.246.525,00	0,00	13.544.246.525,00	100,00
Beban Pegawai	10.226.046.975,00	0,00	10.226.046.975,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	3.313.599.550,00	0,00	3.313.599.550,00	100,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN OPERASI	13.544.246.525,00	0,00	13.544.246.525,00	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	194.628.141,00	0,00	194.628.141,00	100,00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	161.283.603,00	0,00	161.283.603,00	100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.005.359,00	0,00	26.005.359,00	100,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.339.179,00	0,00	7.339.179,00	100,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	194.628.141,00	0,00	194.628.141,00	100,00
BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga.	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	13.738.874.666,00	0,00	13.738.874.666,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(13.562.854.666,00)	0,00	(13.562.854.666,00)	100,00

Denpasar, 31 Desember 2022 Pengguna Anggaran



Tjok bagus Pemayun, APar.MM NIP: 196609071999031004

DINAS PARIWISATA LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam rupiah)

	1			Dalam rupiah)
UBAIAN	2000	0004	Kenaikan /	(0/)
URAIAN	2022	2021	Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN DAERAH-LO	176.020.000,00	0,00	176.020.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	174.020.000,00	0,00	174.020.000,00	100,00
Pendapatan Hibah-LO	174.020.000,00	0,00	174.020.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok	93.463.400,00	0,00	93.463.400,00	100,00
Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO				
Pendapatan Hibah dari Kelompok	93.463.400,00	0,00	93.463.400,00	100,00
Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	93.463.400,00	0,00	93.463.400,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam	93.403.400,00	0,00	93.403.400,00	100,00
Negeri-LO				
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/	80.556.600,00	0,00	80.556.600,00	100,00
Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO				
Pendapatan Hibah dari	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO				
Pendapatan Hibah dari	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam	·		·	
Negeri-LO				
Pendapatan Hibah dari	78.856.600,00	0,00	78.856.600,00	100,00
Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO				
Pendapatan Hibah dari	78.856.600,00	0,00	78.856.600,00	100,00
Lembaga/Organisasi Swasta Dalam		·	·	
Negeri-LO				
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN	174.020.000,00	0,00	174.020.000,00	100,00
DAERAH YANG SAH- LO SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan AsetNon Lancar-LO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Surplus Penjualan BMD yang Tidak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Dipisahkan-LO				
Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO	2.000.000,00	·	2.000.000,00	
Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Lain-Lain-LO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
BEBAN DAERAH	13.738.874.666,00	0,00	13.738.874.666,00	100,00
BEBAN OPERASI	13.544.246.525,00	0,00	13.544.246.525,00	100,00
Beban Pegawai	10.226.046.975,00	0,00	10.226.046.975,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.366.316.863,00	•	4.366.316.863,00	
Beban Gaji Pokok ASN	3.241.248.657,00	·	3.241.248.657,00	
Beban Gaji Pokok PNS	3.241.248.657,00	·	3.241.248.657,00	•
•	276.926.800,00	·	276.926.800,00	
Beban Tunjangan Keluarga ASN	276.926.800,00	0,00	276.926.800,00	•
Beban Tunjangan Keluarga PNS	·	·		
Beban Tunjangan Jabatan ASN	133.700.000,00	0,00	133.700.000,00	100,00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tunjangan Jabatan PNS	133.700.000,00	0,00	133.700.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	112.870.000,00	0,00	112.870.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	112.870.000,00	0,00	112.870.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.235.000,00	0,00	108.235.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.235.000,00	0,00	108.235.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	165.841.800,00	0,00	165.841.800,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	165.841.800,00	0,00	165.841.800,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.555.263,00	0,00	23.555.263,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.555.263,00	0,00	23.555.263,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	43.849,00	0,00	43.849,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	43.849,00	0,00	43.849,00	100,00
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	277.249.558,00	0,00	277.249.558,00	100,00
Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	277.249.558,00	0,00	277.249.558,00	100,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.661.474,00	0,00		,
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.661.474,00	0,00	6.661.474,00	
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	19.984.462,00	0,00	•	•
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	19.984.462,00	0,00	•	•
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.797.130.112,00	·	•	•
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.318.852.037,00	0,00		
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.318.852.037,00	0,00	·	
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.478.278.075,00	0,00		·
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.478.278.075,00	0,00	·	·
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	62.600.000,00	0,00	62.600.000,00	100,00
Beban Honorarium	62.600.000,00	0,00	62.600.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	62.600.000,00	0,00	62.600.000,00	100,00
Keuangan		_	0010	
Beban Barang dan Jasa	3.313.599.550,00	·	•	•
Beban Barang	370.560.574,00	0,00	•	•
Beban Barang Pakai Habis	370.560.574,00	·	•	-
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	222.248.750,00	·		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.944.354,00	0,00		·
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.979.800,00	0,00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.551.000,00	0,00		·
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.151.956,00	0,00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.865.164,00	0,00	3.865.164,00	100,00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	54.103.800,00	0,00	54.103.800,00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.338.750,00	0,00	6.338.750,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	19.371.000,00	0,00	19.371.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	
Beban Jasa	2.622.839.706,00	0,00		
Beban Jasa Kantor	2.495.798.910,00	0,00	2.495.798.910,00	
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.413.258.700,00	0,00	1.413.258.700,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	126.910.500,00	0,00	126.910.500,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	138.798.400,00	0,00	138.798.400,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	67.699.600,00	0,00	67.699.600,00	100,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	194.278.000,00	0,00	194.278.000,00	100,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan	345.712.000,00	0,00	345.712.000,00	100,00
Pemotretan	·	·	·	
Beban Tagihan Telepon	2.712.426,00	0,00	2.712.426,00	100,00
Beban Tagihan Air	21.150.450,00	0,00	21.150.450,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	66.279.634,00	0,00	66.279.634,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.779.200,00	0,00	·	
Beban luran Jaminan/Asuransi	127.040.796,00	0,00	127.040.796,00	•
Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	61.670.268,00	0,00	·	
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.700.260,00	0,00		,
Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	61.670.268,00	0,00	·	
Beban Pemeliharaan	175.426.170,00	0,00		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.365.766,00	0,00	·	,
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	71.082.910,00	0,00	71.082.910,00	100,00
Perorangan Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	8.848.000,00	0,00	8.848.000,00	100,00
Lainnya Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.611.351,00	0,00	10.611.351,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4.823.505,00	0,00	4.823.505,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76.600.300,00	0,00	76.600.300,00	100,00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	76.600.300,00	0,00	76.600.300,00	100
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.460.104,00	0,00	3.460.104,00	100
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	3.460.104,00	0,00	3.460.104,00	100
Beban Perjalanan Dinas	144.773.100,00	0,00	144.773.100,00	10
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.773.100,00	0,00	144.773.100,00	10
Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.693.100,00	0,00	5.693.100,00	10
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	139.080.000,00	0,00	139.080.000,00	10
Beban Lain-lain	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	10
Beban Lain-lain	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	10
Beban Lain-lain	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	10
Beban Lain-lain	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	10
JUMLAH BEBAN OPERASI	13.544.246.525,00	0,00	13.544.246.525,00	10
Beban Penyusutan dan Amortisasi	194.628.141,00	0,00	194.628.141,00	10
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	161.283.603,00	0,00	161.283.603,00	10
Beban Penyusutan Alat Angkutan	114.746.984,00	0,00	114.746.984,00	10
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	114.746.984,00	0,00	114.746.984,00	10
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	114.746.984,00	0,00	114.746.984,00	10
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.224.960,00	0,00	21.224.960,00	1(
Beban Penyusutan Alat Kantor	6.293.220,00	0,00	6.293.220,00	10
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	6.293.220,00	0,00	6.293.220,00	10
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	14.931.740,00	0,00	14.931.740,00	10
Beban Penyusutan Mebel	2.451.549,00	0,00	2.451.549,00	10
Beban Penyusutan Alat Pendingin	8.359.617,00	0,00	8.359.617,00	10
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.120.574,00	0,00	4.120.574,00	1(
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.099.285,00	0,00	1.099.285,00	10
Beban Penyusutan Alat Studio	1.099.285,00	0,00	1.099.285,00	10
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio Beban Penyusutan Peralatan Studio	168.912,00 930.373,00	0,00	168.912,00 930.373,00	10
Video dan Film Beban Penyusutan Komputer	24.212.374,00	0,00	24.212.374,00	10
Beban Penyusutan Komputer Unit	17.491.524,00	0,00	17.491.524,00	10
Beban Penyusutan Personal Computer	17.491.524,00	0,00	17.491.524,00	10
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	6.720.850,00	0,00	6.720.850,00	10
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	6.720.850,00	0,00	6.720.850,00	10
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.005.359,00	0,00	26.005.359,00	10
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	26.005.359,00	0,00	26.005.359,00	10
		1		10

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	16.548.407,00	0,00	16.548.407,00	100,00
Kantor Beban Penyusutan Bangunan Gudang	400.000,00	0.00	400.000.00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	2.358.174,00	0.00	2.358.174,00	,
Tempat Pertemuan	2.000.17 1,00	0,00	2.000.17 1,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.815.014,00	0,00	1.815.014,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.139.404,00	0,00	1.139.404,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.744.360,00	0,00	3.744.360,00	100,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.339.179,00	0,00	7.339.179,00	100,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.734.500,00	0,00	3.734.500,00	100,00
Beban Penyusutan Jalan	3.734.500,00	0,00	3.734.500,00	100,00
Beban Penyusutan Jalan Khusus	3.734.500,00	0,00	3.734.500,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	678.522,00	0,00	678.522,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	678.522,00	0,00	678.522,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi	678.522,00	0,00	678.522,00	100,00
Beban Penyusutan Instalasi	1.806.532,00	0,00	1.806.532,00	100,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	1.806.532,00	0,00	1.806.532,00	100,00
Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1.806.532,00	0,00	1.806.532,00	,
Beban Penyusutan Jaringan	1.119.625,00	0,00	1.119.625,00	100,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1.119.625,00	0,00	1.119.625,00	100,00
Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	1.119.625,00	0,00	1.119.625,00	100,00
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	194.628.141,00	0,00	194.628.141,00	100,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	13.738.874.666,00	0,00	13.738.874.666,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(13.562.854.666,00)	0,00	(13.562.854.666,00)	100,00

Denpasar, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran



Tjok bagus Pemayun, APar.MM NIP: 196609071999031004

3.26.0.00.0.00.01. - Dinas Pariwisata

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31Desember2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
Ekuitas	6.929.995.532,00	6.929.995.532,00
RK PPKD	13.604.520.144,00	0,00
Surplus/Defisit-LO	(13.562.854.666,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD	3.214.175,00	0,00
Koreksi Nilai Pendapatan-LO	(2.000.000,00)	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	6.972.875.185,00	6.929.995.532,00

Kepala Dinas Pariwisata



<u>Tjok bagus Pemayun, APar.MM</u> 196609071999031004

SKPD: 0.00.01. - DINAS PARIWISATA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	14.105.482.814,00	13.604.520.144,00		-
BELANJA DAEKAN	ŕ	ŕ	,	•
BELANJA OPERASI	14.005.482.814,00	13.505.075.599,00	96,43	0,00
Belanja Pegawai	10.630.383.940,00	10.250.660.040,00	96,43	0,00
Belanja Barang dan Jasa	3.375.098.874,00	3.254.415.559,00	96,42	0,00
BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(14.105.482.814,00)	(13.604.520.144,00)	96,45	0,00

Denpasar, 31 Desember 2022



Tjok bagus Pemayun, APar.MM NIP: 196609071999031004

SKPD: 0.00.01. - DINAS PARIWISATA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah	Realisasi		Realisasi
	Anggaran	2022	%	2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	14.105.482.814,00	13.604.520.144,00	96,45	0,00
BELANJA OPERASI	14.005.482.814,00	13.505.075.599,00	96,43	0,00
Belanja Pegawai	10.630.383.940,00	10.250.660.040,00	96,43	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.533.875.940,00	4.364.986.004,00	96,27	0,00
Belanja Gaji Pokok ASN	3.337.896.207,00	3.241.280.413,00	97,11	0,00
Belanja Gaji Pokok PNS	3.337.896.207,00	3.241.280.413,00	97,11	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	286.993.960,00	276.926.800,00	96,49	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	286.993.960,00	276.926.800,00	96,49	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	135.132.500,00	133.700.000,00	98,94	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	135.132.500,00	133.700.000,00	98,94	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	129.971.000,00	112.870.000,00	86,84	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	129.971.000,00	112.870.000,00	86,84	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	109.754.500,00	108.235.000,00	98,62	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	109.754.500,00	108.235.000,00	98,62	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	169.734.375,00	165.841.800,00	97,71	0,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	169.734.375,00	165.841.800,00	97,71	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33.693.268,00	23.555.263,00	69,91	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	33.693.268,00	23.555.263,00	69,91	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	43.849,00	43.849,00	100,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	43.849,00	43.849,00	100,00	0,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	275.886.943,00	275.886.943,00	100,00	0,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	275.886.943,00	275.886.943,00	100,00	0,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.909.513,00	6.661.474,00	96,41	0,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.909.513,00	6.661.474,00	96,41	0,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	20.728.569,00	19.984.462,00	96,41	0,00
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	20.728.569,00	19.984.462,00	96,41	0,00
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	27.131.256,00	0,00	0,00	0,00
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	27.131.256,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.013.618.000,00	5.823.074.036,00	96,83	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.405.447.200,00	2.323.826.328,00	96,61	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.405.447.200,00	2.323.826.328,00	96,61	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.608.170.800,00	3.499.247.708,00	96,98	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.608.170.800,00	3.499.247.708,00	96,98	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	82.890.000,00	62.600.000,00	75,52	0,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	90.000,00	0,00	0,00	0,00

1 Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang	2 82.800.000,00 82.800.000,00 3.375.098.874,00 313.863.395,00	3 62.600.000,00 62.600.000,00	4 75,60 75,60	5 0,0 0
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang	82.800.000,00 3.375.098.874,00 313.863.395,00	·		0,00
Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang	3.375.098.874,00 313.863.395,00	62.600.000,00	75,60	
Belanja Barang	313.863.395,00		-	0,00
	•	3.254.415.559,00	96,42	0,00
Belanja Barang Pakai Habis		287.104.761,00	91,47	0,00
	313.863.395,00	287.104.761,00	91,47	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	148.002.300,00	143.585.250,00	97,02	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.129.950,00	30.469.516,00	77,87	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.599.100,00	16.346.044,00	87,89	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.469.045,00	15.174.656,00	82,16	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.178.000,00	3.085.295,00	73,85	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	55.500.000,00	53.763.000,00	96,87	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.375.000,00	19.371.000,00	79,47	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.250.000,00	1.950.000,00	86,67	0,00
Belanja Jasa	2.693.503.168,00	2.621.474.968,00	97,33	0,00
Belanja Jasa Kantor	2.565.768.160,00	2.494.434.172,00	97,22	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas,	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.422.683.600,00	1.413.258.700,00	99,34	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	127.283.512,00	126.910.500,00	99,71	0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	138.798.400,00	138.798.400,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	67.699.600,00	67.699.600,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	203.000.000,00	194.278.000,00	95,70	0,0
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	346.283.048,00	345.712.000,00	99,84	0,00
Belanja Tagihan Telepon	18.000.000,00	2.723.165,00	15,13	0,00
Belanja Tagihan Air	30.000.000,00	20.383.370,00	67,94	0,00
Belanja Tagihan Listrik	90.000.000,00	65.671.237,00	72,97	0,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	2.220.000,00	100,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000,00	8.779.200,00	87,79	0,00
Belanja luran Jaminan/Asuransi	127.735.008,00	127.040.796,00	99,46	0,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	62.007.264,00	61.670.268,00	99,46	0,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.720.480,00	3.700.260,00	99,46	0,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	62.007.264,00	61.670.268,00	99,46	0,00
Belanja Pemeliharaan	217.278.311,00	201.062.730,00	92,54	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.600.000,00	95.365.766,00	93,86	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	75.160.000,00	71.082.910,00	94,58	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.760.000,00	8.848.000,00	90,66	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.680.000,00	10.611.351,00	90,85	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.000.000,00	4.823.505,00	96,47	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76.857.311,00	76.600.300,00	99,67	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	76.857.311,00	76.600.300,00	99,67	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.821.000,00	29.096.664,00	74,95	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	35.321.000,00	25.636.560,00	72,58	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	3.500.000,00	3.460.104,00	98,86	0,00
Belana Perjalanan Dinas	150.454.000,00	144.773.100,00	96,22	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.454.000,00	144.773.100,00	96,22	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.624.000,00	5.693.100,00	85,95	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	143.830.000,00	139.080.000,00	96,70	0,00
BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(14.105.482.814,00)	(13.604.520.144,00)	96,45	0,00

Denpasar, 31 Desember 2022 Kepala Dinas Pariwisata



<u>Tjok bagus Pemayun, APar.MM</u> NIP: 196609071999031004



ပ်စ်ကိန္တ႑ျပာပိခဲ့ဒီ ကက် PEMERINTAH PROVINSI BALI ထိုအပါ ပက်ပိက္ကဏ

DINAS PARIWISATA ကက် ကက်ပ်ခ်ာ၏ င်္ဂလာကိန်ာ၏ ဥဟာပိနာါ

BALI GOVERNMENT TOURISM OFFICE

ကောင်္ကျ (နည်း) ပဲစာရို စီစီး စက္ကလည္းကစ္ပါ(၇စားကြလာရို (၀ဣကာ) (ဣဣဣတလႏႈစစာသည် – ကလ် (ပ၀ဣဣရ JALAN S. PARMAN NITI MANDALA RENON, TELEPON (0361) 222387 DENPASAR - BALI 80235 http://www.disparda.baliprov.go.id, e-mail : infotourism@baliprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

Laporan Keuangan OPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalK) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir adalah Merupakan Tanggungjawab Kami,

Pengelolaan APBD yang menjadi Tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, Standar Akuntansi Pemerintah dan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bali, Januari 2023

Kepala Dinas Parryisata Provinsi Bali

Tjok. Bagus Pemayun, A.Par.MM

NIP. 196609071999031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan OPD tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1425).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2022 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi Belanja Tahun 2022 adalah sebesar Rp **13.604.520.144,00** atau mencapai 96,45% dari anggarannya.

Realisasi *Belanja Langsung* Tahun Anggaran 2022 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. **13.604.520.144,00** atau 96.44% dari anggarannya;

Seluruh program kegiatan Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerjanya, yaitu :

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2022 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 7.430.609.090,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 31.867.523,00 atau mencapai 0,43 % dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp. 7.398.741.567,00 atau mencapai 99,58 % dari seluruh aset. Sedangkan aset lainnya jumlahnya adalah Rp. 45.232.000,00 atau mencapai 0,61 % dari seluruh aset.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 457.733.905,00 dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 6.987.971.354,00 Jadi Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp. 7.445.705.259,00.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan Laporan Basis Akrual adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban dan Surflus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan Tahun 2022.

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 176.020.000,00.

Realisasi Beban LO Tahun 2022 sebesar Rp.13.738.874.666,00

Realisasi Surflus / Defisit dari Operasional Tahun 2022 sebesar (Rp. 13.562.854.666,00).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

No	URAIAN	2022	2021
1	Ekuitas Awal	6.929.995.532,00	6.929.532,00
2	Surflus /Defisit-LO	(13.562.854.666,00)	0,00

3	Dampak Kumulatif Perubahan		
	Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Pendapatan LO Tetap	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Antar OPD	3.214.175,00	0,00
	Koreksi Nilai Pendapatan-LO	(2.000.000,00)	
4	RK PPKD	13.604.520.144,00	0,00
5	Jumlah Ekuitas Akhir	6.972.875.185,00	6.929.995.532,00



Laporan keuangan tahun 2022 ini kami sajikan secara lengkap dengan salah satu wujud transparasi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (full disclosure).

BABI

PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan keuangan OPD Dinas Pariwisata Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana OPD;
- b) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPDmenyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);

- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 6322);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25)
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
- (k) Peraturan Daerah Nomor.8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 7).

(I) Peraturan Gubernur Bali No. 39 tahun 2022 tentang System dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Ekonomi Makro

Kebijakan Keuangan

Indikator Pecapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi

Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional (LO) Neraca Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

,

Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

BABII

INFORMASI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA APBD

EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro Provinsi Bali pada tahun 2022 sudah mulai membaik seiring penanganan pandemi Covid-19 yang semakin baik. Walau belum mencapai tingkat kunjungan sebelum pandemi, kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2022 telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,57%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,80%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,363.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,44.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,84%.
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 6,44%.
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp245,23 triliun;

Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran

penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahu n 202 0	Tahu n 2021	Tahu n 202 2	Naik/turun 2021-2022 (poin)
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	3,78	4,53	4,57	0,04
2	Jumlah penduduk miskin (Ribu	165,	201,9	205,	3,71
	Orang)	19	7	68	
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,78	10,14	9,54	-0,60
4	Peringkat Provinsi	1	1	3	2

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali (Provinsi Bali dalam Angka 2020 & 2021) dan BPS (Statistik Indonesia 2020 & 2021)

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2022 (keadaan Maret 2022) sebesar 4,57% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin tercatat 4,53%. Peningkatan harga-harga yang terjadi pada tahun 2022 disinyalir memberikan dampak pada kemiskinan di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Urai an	Tah un 202 0	Tah un 202 1	Tah un 202 2	Naik/Tu run 2021- 2022 (poin)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,5	0,6	0,62	-0,06
		2	8		
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,6	1,7	1,59	-0,12
		1	1		
3	Peringkat Provinsi	1	4	2	2

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali (Provinsi Bali dalam Angka 2021 & 2022) dan BPS (Statistik Indonesia 2021 & 2022)

Tabel 2.1.1.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Urai an	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 202 2	Naik/Tu run 2021- 2022 (poin)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,1	0,1	0,13	-0,02
		0	5		

2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,3 8	0,4 2	0,39	-0,03
3	Peringkat Provinsi	1	4	1	3

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebesar 4,80%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali

N o	Urai an	Tah un 202 0	Tah un 202 1	Tah un 202 2	Naik/Tu run 2021- 2022 (poin)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,63	5,3 7	4,80	-0,57
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,4 9	5,86	-0,63
3	Peringkat Provinsi	18	19	20	1

Sumber Dokumen: BPS

TPT di Provinsi Bali Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,80%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 5,37% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,86%.

Indek Gini (Gini Ratio)

Indek **Gini** atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata utlak/ timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebesar 0,363 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3. Gini Ratio Provinsi Bali

No	Gini Ratio	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahu n 2022	Naik/turun 2021- 2022 (poin)
1	Tingkat Provinsi	0,3 69	0,3 78	0,3 63	-0,015
2	Tingkat Nasional	0,3 81	0,3 84	0,3 84	0
3	Peringkat Provinsi	24	25	21	4

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,363 Angka ini turun 0,015 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,378 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang (60≤IPM<70)
- c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebesar 76,44 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

N o	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun 2021- 2022 (%)
1	Jembrana	72, 36	72,75	73,58	1,14
2	Tabanan	76, 17	76,45	76,75	0,39
3	Badung	81, 60	81,83	82,13	0,37
4	Gianyar	77, 36	77,70	78,39	0,89
5	Klungkung	71, 73	71,75	72,55	1,11
6	Bangli	69, 36	69,37	70,26	1,28
7	Karangasem	67, 35	67,36	68,28	1,37
8	Buleleng	72, 55	72,56	73,45	1,23
9	Denpasar	83, 93	84,03	84,37	0,40
10	Provinsi Bali	75, 50	75,69	76,44	0,99
11	Indonesia/Nasional	71, 94	72,29	72,91	0,86
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	0

Sumber Dokumen BPS Provinsi Bali

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali tahun 2022 adalah sebesar 76,44 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 75,69 mengalami kenaikan sebesar 0,99 persen. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), demikian pula dengan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami peningkatan seiring membaiknya perekonomian Bali. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,60 tahun pada Tahun 2022, lebih Panjang 0,36 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,39 tahun dengan harapan lama sekolah 13,48 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp13.942 ribu atau meningkat Rp122 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Kabupaten/Kota				
NO	Urai an	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp.)				
	Jembrana	8,95	8,89	9,16	
	Tabanan	14,81	14,52	14,94	
	Badung	31,15	29,05	31,95	
	Gianyar	17,44	17,26	17,96	
	Klungkung	5,61	5,60	5,77	
	Bangli	4,40	4,38	4,51	
	Karangasem	10,63	10,57	10,84	
	Buleleng	22,07	21,79	22,46	
	Denpasar	32,74	32,44	34,08	
	Provinsi Bali	147,50	143,86	150,82	
	Indonesia	10.723,0	11.120,0	11.710.4	
		0	8	0	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	Jembrana	-4,98	-0,65	2,98	
	Tabanan	-6,17	-1,98	2,94	
	Badung	-16,55	-6,74	9,97	
	Gianyar	-8,39	-1,05	4,04	
	Klungkung	-6,38	-0,23	3,12	
	Bangli	-4,10	-0,33	2,79	
	Karangasem	-4,49	-0,56	2,58	
	Buleleng	-5,80	-1,27	3,11	
	Denpasar	-9,44	-0,92	5,06	
	Provinsi Bali	-9,34	-2,46	4,84	
	Indonesia	-2,07	3,70	5,31	
3	Peringkat Provinsi (Nasional)				
	Jembrana	3	4	6	
	Tabanan	5	8	7	
	Badung	9	9	1	
	Gianyar	7	6	3	

	Klungkung	6	1	4
	Bangli	1	2	8
	Karangasem	2	3	9
	Buleleng	4	7	5
	Denpasar	8	5	2
4	Peringkat Nasional	34	34	22

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Selama tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami percepatan yaitu tercatat sebesar 4,84 persen. Setelah sebelumnya ekonomi Bali mengalami konstraksi selama dua tahun berturut-turut, yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, pada tahun 2022 ekonomi Bali kembali bangkit dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan aktivitas pariwisata di Bali selama tahun 2022 tercermin pada pertumbuhan positif tertinggi yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (transportasi dan Pergudangan), kategori D (pengadaan listrik dan gas) dan kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Kategori H dengan aktivitas yang dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan tercatat mengalami kenaikan setinggi 21,55 persen, diikuti kategori D yang tumbuh sebesar 16,02 persen, serta kategori I yang mencakup kegiatan hotel dan restoran tercatat mengalami peningkatan setinggi 13,84 persen.

Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta

distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10- 30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar- besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2022 adalah sebesar 6,44% untuk Kota Denpasar dan 4,63% untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

N o	Urai an	Tah un 202 0	Tah un 202 1	Tah un 202 2	Naik/Tu run 2021- 2022 (poin)
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	0,5 5	2,0 1	6,4 4	4,43
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	2,4 8	2,3 9	4,6 3	2,24
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,6 8	1,8 7	5,5 1	3,64
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	2	1	1
5	Peringkat Nasional (Denpasar)	55	48	26	22

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,44%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,01% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51%.

Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan	2.930.615,57	3.070.582,96	3.189.288,61
	Perikanan			
	2. Pertambangan dan Penggalian	118.374,91	119.317,96	123.082,36
	3. Industri Pengolahan	695.982,79	716.617,94	775.281,70
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.577,06	19.752,65	21.388,48
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	11.156,30	10.839,67	11.085,03
	Ulang			
	6. Konstruksi	1.400.607,92	1.458.174,00	1.560.610,00

r			1	1
	7. Perdagangan Besar dan	1.338.375,95	1.376.928,59	1.515.979,77
	Eceran; Reparasi Mobil dan			
	Sepeda Motor	4.050.404.00	4 000 040 40	1 000 100 11
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.952.104,88	1.832.219,19	1.992.432,14
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.647.107,45	1.488.190,25	1.725.726,48
	10. Informasi dan Komunikasi	887.842,11	932.303,72	920.103,44
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	455.593,41	466.840,86	564.164,82
	12. Real Estate	631.167,24	646.295,81	686.321,83
	13. Jasa Perusahaan	105.211,00	107.653,88	121.414,09
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	391.021,22	393.766,62	408.829,98
	15. Jasa Pendidikan	324.458,94	325.998,71	329.302,20
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	324.602,59	346.488,60	359.633,80
	17. Jasa lainnya	203.814,55	198.663,54	227.611,00
	PDRB ADH Berlaku	13.437.613,88	13.510.634,96	14.532.255,74
2	Tabanan			
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.119.363,50	5.189.685,02	5.423.615,00
	2. Pertambangan dan Penggalian	254.012,28	255.255,74	268.642,56
	3. Industri Pengolahan	1.299.423,28	1.306.413,37	1.420.241,95
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	24.735,71	24.403,49	27.812,16
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.778,85	36.266,15	37.610,48
	6. Konstruksi	2.414.171,95	2.271.017,70	2.416.304,08
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.951.316,55	1.951.250,89	2.133.918,14
	Sepeda Motor			
	8. Transportasi dan Pergudangan	339.515,95	319.072,83	361.380,95

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.812.945,67	3.446.784,36	4.051.051,59
	10. Informasi dan Komunikasi	1.388.800,92	1.435.394,67	1.437.157,09
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	835.311,30	857.344,10	1.012.001,46
	12. Real Estate	1.164.683,31	1.175.116,05	1.243.819,43
	13. Jasa Perusahaan	236.731,96	235.148,19	261.980,08
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.836.580,12 1.930.091,76		1.903.670,09
	15. Jasa Pendidikan	459.203,32	466.050,04	472.511,89
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	605.063,30	641.802,15	664.021,58
	17. Jasa lainnya	478.946,91	479.045,63	545.559,37
	PDRB ADH Berlaku	22.257.584,90	22.021.142,15	23.681.297,92
		,	·	·
3	Badung			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.725.855,68	3.817.979,06	3.958.842,15
	2. Pertambangan dan Penggalian	166.713,27	162.834,67	173.454,78
	3. Industri Pengolahan	2.157.153,95	2.149.637,85	2.340.266,80
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	76.763,63	69.460,68	86.470,56
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	128.872,64	122.318,12	126.000,66
	6. Konstruksi	5.498.713,60	5.225.361,78	5.682.997,77
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.820.088,34	3.838.160,37	4.320.982,49
	8. Transportasi dan Pergudangan	8.384.068,60	5.734.099,42	11.477.866,06
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.993.933,23	10.415.394,46	13.034.218,24
	10. Informasi dan Komunikasi	3.908.081,77	4.073.862,12	4.133.369,68
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.501.162,64	1.487.860,16	1.753.186,88
	12. Real Estate	2.012.484,11	2.064.844,15	2.204.535,95
	13. Jasa Perusahaan	410.121,22	402.669,59	458.276,24
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.989.475,23	2.001.229,44	2.086.235,78
	15. Jasa Pendidikan	1.919.157,31	1.946.425,97	1.965.509,23
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	864.305,56	905.962,18	942.239,86
	17. Jasa lainnya	469.076,49	463.980,15	545.547,02
	PDRB ADH Berlaku	49.026.027,29	44.882.080,18	55.290.000,16
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.389.013,60	3.471.186,95	3.510.636,94

	2. Pertambangan dan Penggalian	369.052,05	368.119,17	391.638,87
	3. Industri Pengolahan	3.106.479,95	3.144.587,50	3.435.572,11
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	27.365,29	26.068,24	31.302,85
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35.043,70	34.394,36	34.784,60
	6. Konstruksi	3.332.083,02	3.393.155,41	3.622.140,00
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.099.485,97	2.113.841,94	2.315.521,87
	8. Transportasi dan Pergudangan	221.894,64	211.261,08	239.273,09
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.110.119,27	4.669.744,42	5.511.589,61
	10. Informasi dan Komunikasi	1.859.395,01	1.926.282,61	1.934.235,55
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.056.280,56	1.099.702,95	1.306.803,62
	12. Real Estate	1.217.275,94	1.237.177,72	1.302.343,47
	13. Jasa Perusahaan	325.881,18	324.094,10	368.103,38
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.523.906,35	1.545.599,71	1.594.599,03
	15. Jasa Pendidikan	669.876,85	688.812,66	698.609,27
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	993.236,40	1.037.936,36	1.074.711,90
	17. Jasa lainnya	505.331,36	496.261,86	572.339,60
	PDRB ADH Berlaku	25.841.721,14	25.788.227,04	27.944.205,76
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.902.052,11	1.946.865,17	2.026.791,81
	2. Pertambangan dan Penggalian	267.131,79	257.303,63	279.591,68
	3. Industri Pengolahan	811.400,29	831.797,37	903.301,57
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	9.819,24	9.453,77	10.932,89
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.011,82	17.663,81	17.998,95
	6. Konstruksi	846.989,78	910.109,32	979.637,48
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	695.585,92	713.517,95	804.462,79
	8. Transportasi dan Pergudangan	177.009,85	177.018,76	200.722,73
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	874.764,52	751.304,82	923.818,67
	10. Informasi dan Komunikasi	848.939,96	874.940,80	876.961,44
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	340.352,40	351.455,38	417.684,68
	12. Real Estate	215.515,38	210.352,77	223.018,95
	13. Jasa Perusahaan	85.489,90	84.122,06	94.767,58
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	514.264,65	533.140,49	527.576,47
	Sosial Wajib			

16_Jasa Kesehatan dan Kegiatan 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,		15. Jasa Pendidikan	224.480,20	224.908,84	229.617,29
17. Jasa lainnya		16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan	410.796,65	440.604,63	458.999,65
PDRB ADH Berlaku		Sosial			
6 Bangli 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.870.107,09 1.928.292,10 2.034.852,34 2. Pertambangan dan Penggalian 126.723,44 125.194,80 131.483,99 3. Industri Pengolahan 607.310,57 603.798,52 641.493,77 4. Pengadaan Listrik dan Gas 2.734,87 2.875,96 3.059,41 5. Pengadaan Alir, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4.561,78 4.733,26 4.773,48 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 661.427,44 672.894,39 738.895,58 8. Transportasi dan Pergudangan Sepeda Motor 74.460,59 72.459,32 79.726,96 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 763.211,19 704.725,08 821.501,97 10. Informasi dan Komunikasi 313.720,13 329.754,70 338.265,01 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65 220.625,91 232.419,23 13. Jasa Perusahaan 37.513,50 36.890,99 43.94,34 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perrikanan 1.870.107,09 1.928.292,10 2.034.852,34 2. Pertambangan dan Penggalian 126.723,44 125.194,80 131.483,99 3. Industri Pengolahan 607.310,57 603.798,52 641.493,77 4. Pengadaan Listrik dan Gas 2.734,87 2.875,96 3.059,41 5. Pengadaan Listrik dan Gas 2.734,87 2.875,96 3.059,41 5. Pengadaan Listrik dan Gas 2.734,87 4.733,26 4.773,48 5. Pengadaan Listrik dan Daur 4.561,78 4.733,26 4.773,48 Ulang 6. Konstruksi 567.792,40 613.097,08 654.522,73 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 661.427,44 672.894,39 738.895,58 8. Transportasi dan Pergudangan 74.460,59 72.459,32 79.726,96 9. Penyediaan Akomodasi dan Malinum 763.211,19 704.725,08 821.501,97 10. Informasi dan Komunikasi 313.720,13 329.754,70 338.265,01 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65		PDRB ADH Berlaku	8.450.673,79	8.534.432,93	9.210.208,54
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perrikanan 1.870.107,09 1.928.292,10 2.034.852,34 2. Pertambangan dan Penggalian 126.723,44 125.194,80 131.483,99 3. Industri Pengolahan 607.310,57 603.798,52 641.493,77 4. Pengadaan Listrik dan Gas 2.734,87 2.875,96 3.059,41 5. Pengadaan Listrik dan Gas 2.734,87 2.875,96 3.059,41 5. Pengadaan Listrik dan Gas 2.734,87 4.733,26 4.773,48 5. Pengadaan Listrik dan Daur 4.561,78 4.733,26 4.773,48 Ulang 6. Konstruksi 567.792,40 613.097,08 654.522,73 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 661.427,44 672.894,39 738.895,58 8. Transportasi dan Pergudangan 74.460,59 72.459,32 79.726,96 9. Penyediaan Akomodasi dan Malinum 763.211,19 704.725,08 821.501,97 10. Informasi dan Komunikasi 313.720,13 329.754,70 338.265,01 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65					
Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 126.723,44 125.194,80 131.483,99 3. Industri Pengolahan 607.310,57 603.798,52 641.493,77 4. Pengadaan Listrik dan Gas 2.734,87 2.875,96 3.059,41 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6. Konstruksi 567.792,40 613.097,08 654.522,73 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 74.460,59 72.459,32 79.726,96 9. Penyediaan Akomodasi dan Minum 763.211,19 704.725,08 821.501,97 Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 313.720,13 329.754,70 338.265,01 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65 220.625,91 232.419,23 13. Jasa Perusahaan 37.513,50 36.890,99 40.364,95 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa Iainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825,455,95 7.337.505,92 7.522,36 7.523,36 7.52	6				
2. Pertambangan dan Penggalian 126.723,44 125.194,80 131.483,99 3. Industri Pengolahan 607.310,57 603.798,52 641.493,77 4. Pengadaan Listrik dan Gas 2.734,87 2.875,96 3.059,41 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4.561,78 4.733,26 4.773,48 6. Konstruksi 567.792,40 613.097,08 654.522,73 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 661.427,44 672.894,39 738.895,58 8. Transportasi dan Pergudangan Sepada Minum 74.460,59 72.459,32 79.726,96 9. Penyediaan Akomodasi dan Minum 763.211,19 704.725,08 821.501,97 10. Informasi dan Komunikasi 313.720,13 329.754,70 338.265,01 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65 220.625,91 232.419,23 13. Jasa Perusahaan 37.513,50 36.890,99 40.364,95 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 778,678,84 811.021,28 843.222,76 5. Jasa Pendidikan			1.870.107,09	1.928.292,10	2.034.852,34
3. Industri Pengolahan 607.310,57 603.798,52 641.493,77 4. Pengadaan Listrik dan Gas 2.734,87 2.875,96 3.059,41 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6. Konstruksi 567.792,40 613.097,08 654.522,73 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 74.460,59 72.459,32 79.726,96 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 763.211,19 704.725,08 821.501,97 10. Informasi dan Komunikasi 313.720,13 329.754,70 338.265,01 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65 220.625,91 232.419,23 13. Jasa Perusahaan 37.513,50 36.890,99 40.364,95 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 18. Pertambangan dan Penggalian 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 906.871,86 1.005.922,35			126.723.44	125.194.80	131.483.99
4. Pengadaan Listrik dan Gas 2.734,87 2.875,96 3.059,41 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4.561,78 4.733,26 4.773,48 6. Konstruksi 567.792,40 613.097,08 654.522,73 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 661.427,44 672.894,39 738.895,58 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 763.211,19 704.725,08 821.501,97 10. Informasi dan Komunikasi 313.720,13 329.754,70 338.265,01 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65 220.625,91 232.419,23 13. Jasa Perusahaan 37.513,50 36.890,99 40.364,95 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 778.678,84 811.021,28 843.222,76 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109.773,53 113.037,49 119.683,44 20. Pertambangan dan Penggalian 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 7 Karangas				·	·
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4.561,78 4.733,26 4.773,48 6. Konstruksi 567.792,40 613.097,08 654.522,73 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 661.427,44 672.894,39 738.895,58 8. Transportasi dan Pergudangan Sepeda Motor 74.460,59 72.459,32 79.726,96 9. Penyediaan Akomodasi dan Minum 763.211,19 704.725,08 821.501,97 11. Jasa Keuangan dan Akomolikasi 313.720,13 329.754,70 338.265,01 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65 220.625,91 232.419,23 13. Jasa Perusahaan 37.513,50 36.890,99 40.364,95 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 778.678,84 811.021,28 843.222,76 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109.773,53 113.037,49 119.683,44 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 7 Karangasem<		<u> </u>	,		·
6. Konstruksi 567.792,40 613.097,08 654.522,73 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 661.427,44 672.894,39 738.895,58 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 74.460,59 72.459,32 79.726,96 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 763.211,19 704.725,08 821.501,97 10. Informasi dan Komunikasi 313.720,13 329.754,70 338.265,01 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65 220.625,91 232.419,23 13. Jasa Perusahaan 37.513,50 36.890,99 40.364,95 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 778.678,84 811.021,28 843.222,76 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109.773,53 113.037,49 119.683,44 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825.455,95 7.337.505,92 7 <		5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur			·
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 661.427,44 672.894,39 738.895,58 8. Transportasi dan Pergudangan 74.460,59 72.459,32 79.726,96 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 763.211,19 704.725,08 821.501,97 10. Informasi dan Komunikasi 313.720,13 329.754,70 338.265,01 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65 220.625,91 232.419,23 13. Jasa Perusahaan 37.513,50 36.890,99 40.364,95 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 778.678,84 811.021,28 843.222,76 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109.773,53 113.037,49 119.683,44 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825.455,95 7.337.505,92 7 Karangasem 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 1. Pertambangan dan Penggalian Sin			567,792,40	613.097.08	654.522.73
8. Transportasi dan Pergudangan 74.460,59 72.459,32 79.726,96 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 763.211,19 704.725,08 821.501,97 10. Informasi dan Komunikasi 313.720,13 329.754,70 338.265,01 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65 220.625,91 232.419,23 13. Jasa Perusahaan 37.513,50 36.890,99 40.364,95 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 778.678,84 811.021,28 843.222,76 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109.773,53 113.037,49 119.683,44 PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825.455,95 7.337.505,92 7 Karangasem 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 Perikanan 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 Perikanan 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 <td< td=""><td></td><td>Eceran; Reparasi Mobil dan</td><td></td><td>,</td><td>·</td></td<>		Eceran; Reparasi Mobil dan		,	·
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan 13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 17. Jasa Iainnya 17. Jasa Iainnya 17. Jasa Iainnya 17. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2 . Pertambangan dan Penggalian 2 . Pertambangan dan Penggalian 2 . Pengadaan Listrik dan Gas 5 . Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ullang 6 . Konstruksi 7 . Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		•	74,460,59	72,459,32	79.726.96
Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 313.720,13 329.754,70 338.265,01 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65 220.625,91 232.419,23 13. Jasa Perusahaan 37.513,50 36.890,99 40.364,95 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 778.678,84 811.021,28 843.222,76 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109.773,53 113.037,49 119.683,44 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825.455,95 7.337.505,92 7 Karangasem 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sa					
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65 220.625,91 232.419,23 13. Jasa Perusahaan 37.513,50 36.890,99 40.364,95 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 778.678,84 811.021,28 843.222,76 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109.773,53 113.037,49 119.683,44 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825.455,95 7.337.505,92 7 Karangasem 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 Perikanan 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot			7 00.2 , . 0	7 0 111 20,00	0211001,01
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 184.698,36 189.423,47 222.152,25 12. Real Estate 217.603,65 220.625,91 232.419,23 13. Jasa Perusahaan 37.513,50 36.890,99 40.364,95 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 778.678,84 811.021,28 843.222,76 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109.773,53 113.037,49 119.683,44 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825.455,95 7.337.505,92 7 Karangasem 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 Perikanan 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 Perikanan 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143			313.720,13	329.754,70	338.265,01
12. Real Estate 217.603,65 220.625,91 232.419,23 13. Jasa Perusahaan 37.513,50 36.890,99 40.364,95 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 778.678,84 811.021,28 843.222,76 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109.773,53 113.037,49 119.683,44 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825.455,95 7.337.505,92 7 Karangasem 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 Perikanan 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35					·
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 778.678,84 811.021,28 843.222,76 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109.773,53 113.037,49 119.683,44 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825.455,95 7.337.505,92 7 Karangasem 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35			217.603,65	220.625,91	232.419,23
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825.455,95 7.337.505,92 7 Karangasem 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. 325.468,96 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6. Konstruksi 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		13. Jasa Perusahaan	37.513,50	36.890,99	40.364,95
15. Jasa Pendidikan 171.451,06 176.999,18 179.578,83 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109.773,53 113.037,49 119.683,44 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825.455,95 7.337.505,92 7 Karangasem 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35		Pertahanan dan Jaminan	778.678,84	811.021,28	843.222,76
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109.773,53 113.037,49 119.683,44 17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825.455,95 7.337.505,92 7 Karangasem 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 Perikanan 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 Perikanan 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35		,	171.451,06	176.999,18	179.578.83
17. Jasa lainnya 224.317,16 219.632,41 251.509,21 PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825.455,95 7.337.505,92 7 Karangasem 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 2. Pertambangan dan Penggalian 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35		16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	· ·		
PDRB ADH Berlaku 6.716.085,63 6.825.455,95 7.337.505,92 7 Karangasem 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35			224.317.16	219.632.41	251.509.21
7 Karangasem 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 2. Pertambangan dan Penggalian 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35		•			
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 2. Pertambangan dan Penggalian 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35					,-
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.325.468,96 4.521.819,64 4.692.140,04 2. Pertambangan dan Penggalian 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35	7	Karangasem			
2. Pertambangan dan Penggalian 516.243,05 554.412,55 614.611,50 3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35		1. Pertanian, Kehutanan, dan	4.325.468,96	4.521.819,64	4.692.140,04
3. Industri Pengolahan 672.598,87 684.233,95 740.475,76 4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35			516.243.05	554.412.55	614.611.50
4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.732,36 15.350,51 17.178,66 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35					
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22.181,20 21.951,57 22.691,01 6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35	1	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6. Konstruksi 1.083.686,64 1.180.143,24 1.270.811,10 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35		5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur		·	· ·
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 901.699,06 906.871,86 1.005.922,35		•	1.083 686 64	1.180 143 24	1.270 811 10
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				·	
'		Eceran; Reparasi Mobil dan	901.699,06	906.871,86	1.005.922,35
		8. Transportasi dan Pergudangan	2.824.769,48	2.591.359,50	2.789.763,23

9. Penyediaan Akomodasi dan 1.366.240,43 1.222.597,98	1.427.387,30
Makan Minum	1.427.307,30
10. Informasi dan Komunikasi 586.216,99 622.129,03	634.616,08
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 735.908,33 749.128,47	901.446,44
12. Real Estate 671.709,31 687.830,33	721.175,79
13. Jasa Perusahaan 129.302,75 128.621,81	142.518,15
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.365.652,50
15. Jasa Pendidikan 448.049,20 456.813,96	464.023,50
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 373.389,29 403.183,08 Sosial	
17. Jasa lainnya 392.104,53 383.675,62	438.499,58
PDRB ADH Berlaku 16.399.774,86 16.506.624,87	17.669.491,36
	·
8 Buleleng	
1. Pertanian, Kehutanan, dan 7.401.764,17 7.520.875,91 Perikanan	7.713.940,52
2. Pertambangan dan Penggalian 304.999,16 301.179,51	316.017,83
3. Industri Pengolahan 1.964.132,06 2.030.754,00	2.202.415,92
4. Pengadaan Listrik dan Gas 56.709,19 55.482,06	60.525,06
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39.269,31
6. Konstruksi 3.107.411,63 3.199.938,74	3.450.497,17
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.949.038,56 3.963.925,12	,
8. Transportasi dan Pergudangan 370.389,67 353.101,78	389.627,59
9. Penyediaan Akomodasi dan 4.936.389,32 4.398.861,06 Makan Minum	
10. Informasi dan Komunikasi 2.041.965,38 2.119.345,35	2.141.119,70
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1.374.408,17 1.386.820,58	1.657.123,69
12. Real Estate 1.575.248,57 1.614.750,34	1.697.749,64
13. Jasa Perusahaan 228.649,21 227.301,45	255.125,00
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.998.931,25
15. Jasa Pendidikan 2.653.894,06 2.713.608,64	2.741.409,33
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 802.127,53 857.362,87	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sosial	333 02,01
17. Jasa lainnya 618.273,78 622.926,34	711.521,40
PDRB ADH Berlaku 33.302.721,44 33.363.288,29	35.805.284,19
9 Kota Denpasar	
1. Pertanian, Kehutanan, dan 3.499.148,56 3.666.116,48 Perikanan	3.787.130,03
2. Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00	· ·
3. Industri Pengolahan 3.245.409,08 3.311.304,44	3.655.294,27

	4. Pengadaan Listrik dan Gas	263.850,78	246.822,80	294.961,88
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan	130.656,91	134.003,59	133.996,87
	Sampah, Limbah dan Daur			
	Ulang			
	6. Konstruksi	5.505.248,38	6.012.565,41	6.520.700,87
	7. Perdagangan Besar dan	4.940.459,45	4.897.543,85	5.468.721,49
	Eceran; Reparasi Mobil dan		,	
	Sepeda Motor			
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.352.824,59	1.242.527,75	
	9. Penyediaan Akomodasi dan	10.588.600,92	9.426.092,65	11.432.033,63
	Makan Minum			
	10. Informasi dan Komunikasi	2.621.460,60		2.765.656,56
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.038.833,12	3.115.594,91	3.654.675,52
	12. Real Estate	2.196.668,77	2.239.723,84	2.372.487,01
	13. Jasa Perusahaan	981.338,31		1.106.931,48
	14.Administrasi Pemerintahan,	2.773.756,98	2.956.508,25	2.993.879,20
	Pertahanan dan Jaminan			
	Sosial Wajib			
	15. Jasa Pendidikan	6.315.243,42	6.460.636,23	6.562.279,44
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1.375.193,24	1.490.848,25	1.552.815,68
	Sosial			
	17. Jasa lainnya	778.768,74	779.222,35	895.053,48
	PDRB ADH Berlaku	49.607.461,84	49.687.176,87	54.650.427,19
	1 D (D) (D) (D)	10.007.101,01	10.007.17.0,07	0 1.000.127,10
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan	33.832.175,5	34.767.442,14	35.989.291,58
	Perikanan	1		
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.133.158,94	2.147.972,67	2.312.139,37
	3. Industri Pengolahan	14.435.824,06	14.726.099,69	16.158.833,47
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	493.536,97	468.453,78	553.539,86
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	425.542,89	414.723,58	421.646,34
	6. Konstruksi	23.597.046.89	24.175.488,91	26.135.968.57
	7. Perdagangan Besar dan			
	Eceran; Reparasi Mobil dan	20.269.223,16	20.318.843,33	22.555.301,67
	Sepeda Motor			
	8. Transportasi dan Pergudangan	15.577.743.29	12.435.888,96	18.889.724.59
	9. Penyediaan Akomodasi dan	41.093.385,95	36.589.951,56	
	Makan Minum			
	10. Informasi dan Komunikasi	14.256.709,70	14.836.631,89	15.028.830,69
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.534.044,34	9.686.119,09	11.486.407,31
	12. Real Estate	9.928.075,28	10.090.923,86	10.682.357,19
	13. Jasa Perusahaan	2.572.985,11	2.533.790,91	-
	14. Administrasi Pemerintahan,	12 201 720 72	·	·
	Pertahanan dan Jaminan	13.201.730,73	13.698.701,25	13.004.323,03
	Sosial Wajib			
	15. Jasa Pendidikan	13.186.473,55	13.466.415,72	13.613.259.60

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.780.170,76	6.233.630,75	6.469.156,42
17. Jasa lainnya	3.907.894,20	3.876.375,67	4.423.392,89
PDRB ADH Berlaku	224.225.721,3	220.467.453,7 8	245.233.236,4

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat beberapa perubahan jenis Pajak Provinsi, yaitu : jenis Pajak Daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- b. Retribusi Daerah Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis Retribusi yang dapat dipungut. Jenis Retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terdiri dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan; Kerjasama Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi,

Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD dan Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Lebih lanjut Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat Umum dan dana yang bersifat Khusus. Dana yang bersifat umum dialokasikan dalam bentuk:
 - Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam;
 - Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk Daerah Provinsi, bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh Daerah Provinsi. Sedangkan untuk Dana Transfer Khusus sendiri dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- b. Transfer Antar Daerah yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
 - a. Hibah yaitu bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan:
 - b. Dana Darurat yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan Kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Peningkatan Pendapatan Daerah akan diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain:
- 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui : Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :
 - a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu:
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
 - ь. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
 - Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.

- Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
- ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
- Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif/biaya sesuai ISO 9001 – 2008 pada UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota diseluruh Bali.
- Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan BUMDES.
- Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya.
- Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil.
- Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai Samsat, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya.
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
 - Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- Peningkatan alokasi dari Pendapatan Transfer dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program- program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan Pendapatan Transfer khususnya dari Dana Bagi Hasil dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan

melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Untuk itu pengelolaan belanja daerah Provinsi Bali Tahun 2022 akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
- 2. Prioritas Penggunaan Anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.
- 3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
- 4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Transparansi dan Akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Selanjutnya untuk klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing Pemerintah Daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan belanja daerah Tahun 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- 1. Penerimaan Pembiayaan
- 2. Pengeluaran Pembiayaan.

Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto yang selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit anggaran. Dengan demikian pembiayaan juga bisa disebut sebagai transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk

menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
- 2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perUndang-Undangan;
- 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- 4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan;
- 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
- 6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

 Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan

penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

- 2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sebagai berikut.

- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu:

Prioritas 1: Pangan, Sandang dan Papan Prioritas 2: Kesehatan dan Pendidikan

Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenaga kerjaan

Prioritas 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Prioritas 5: Pariwisata

Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun Anggaran 2022.

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp.**500.962.670,00** yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 14.105.482.814,00 terealisasi sebesar Rp. 13.604.520.144,00 atau 96.45%.

Capaian bagian belanja sebesar Rp. 96,45% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- **Belanja Langsung** target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 14.105.482.814,00 terealisasi sebesar Rp. 13.604.520.144,00 atau 96,45%.

Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 13.604.520.144,00 di atas digunakan untuk membiayai pelaksananaan program-program di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut :

PROGRAM	Anggaran Setelah Perubahan RP.	Realisasi Rp.	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	12.417.107.365,00	11.952.042.901,00	92,56
PARIWISATA	358.469.345,00	346.842.212,00	96,75
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI	580.213.291,00	572.110.553,00	99,60
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	235.133.799,00	233.657.198,00	97,87
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	514.559.014,00	499.867.280,00	97,14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Setelah Perubahan 12.417.107.365,00 358.469.345,00 580.213.291,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Realisasi Perubahan 12.417.107.365,00 11.952.042.901,00 358.469.345,00 346.842.212,00 572.110.553,00

Jumlah	14.105.482.814,00	13.604.520.144,00	96,45

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran (LRA13).

Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telahDitetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 75% kebawah)

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 ada Program Kegiatan yang serapannya belanjanya dibawah 75%.

KEGIATAN	FISIK (%)	KE- UAN GAN (%)	HAMBATAN DAN KENDALA PENCAPAIAN TARGET.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSi Bali' Penyediaan komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	100	73,84	Efisiensi Anggaran
 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 	100	66,92	Efisiensi Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	64,33	Efisiensi Anggaran

Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan OPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada OPD/PPKD. Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya (lampiran 3) dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara OPD (lampiran).

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 41 (empat puluh) entitas akuntansi yang meliputi 40 (empat puluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)/PPKD yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada laporan, Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode

- Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- 2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- 3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

- indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- 4. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- 5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- 6. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periodepelaporan.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned;
 atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan OPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, danjika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada OPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatantransfer-LO.
- Mutasi aset antar OPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi OPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah asset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran asset sejenis.

Kebijakan Akuntansi Beban Dan Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkanbeban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain

- yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar dimuka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran.dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh BLUD.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada SMAN/SMKN yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

Penyajian

Beban diajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung atau Belanja Operasi.

Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Pengakuan

a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.

- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan BebanTransfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernurmaka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan pengurang Beban Transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Pengukuran.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah;
 - 3) Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

1) Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

2) Piutang Dana Alokasi Umum;

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu

3) Piutang Dana Alokasi Khusus;

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat

- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 6) Piutang Bagi Hasil;
- 7) Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

8) Piutang Kelebihan Transfer.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

 Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

 a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. DanaBagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12
 bulan berikutnya.

Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah.

- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- e. Persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluarsa (*expired*) direklas ke aset lain-lain berdasarkan berita acara reklasifikasi dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi.

Persediaan diakui

- a. Padasaat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaandicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

- a. Investasi Jangka Pendek
 - Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Investasi Jangka Panjang
 - Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi

menurut sifatnya, yaitu:

- Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
 Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode
 nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi

yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

- a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
 - 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

- b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitungsejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun;
 dan/atau

- b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
 dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - b) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - c) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - d) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - e) Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - f) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan executing agency;
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

- (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
- (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan chanelling agency
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau (2)Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun: dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya;dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidakada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggaltransaksi.

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalahsebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

 Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

4. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk asset tetap renovasi.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap

tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Berwujud;
- 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- 6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- 7. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untukmembawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiappotongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/ perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas asset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- Kriteria batasan minimal jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.
- Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output

berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalizationthresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasiatau tidak.

h. Penambahan masamanfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan *overhaul* dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi.Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

b. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metodepenyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecualihewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a. Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- b. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- c. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

- d. Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- e. Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f. Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- g. Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasisifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

c. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untukperolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

d. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta asset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan asset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;
- 2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam asset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan kepos asset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke asset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi,dan jaringan; asset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu meliputi:

a. Asuransi;

- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksiyang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan kemasing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi forcemajeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu

keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi

perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah.Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan

dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah

pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

- I. Tagihan Jangka Panjang
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

- II. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- c) Bangun Guna Serah BGS (Build, Operate, Transfer BOT) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- d) Bangun Serah Guna BSG (*Build, Transfer, Operate BTO*)

 BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

III. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

IV. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

V. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan mengunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan

secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
- a. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions)
 Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)
 Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related events) Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events)
 Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode

penjualan hingga jatuh tempo.

Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- 1. Ekuitas
- 2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos.Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan

pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasayang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 3. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

4. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam Tahun 2022 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022.

Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2022 terdiri dari :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAERAH

Tidak ada Pendapatan daerah Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2022 .

BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 14.105.482.814,00 realisasinya sebesar Rp. 13.604.520.144,00 atau 96,45%. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

BELANJA DAERAH

1. Belanja Operasi

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. **14.005.482.814,00** terealisasi sebesar Rp. **13.505.075.599,00** atau 96,45%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.630.383.940,00 terealisasi sebesar Rp. 10.250.660.040,00 atau 96,43%. Rincian atas jumlah Belanja pegawai sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Belanja Pegawai	10.630.383.940,00	10.250.660.040,00	96,43
	Jumlah	10.630.383.940,00	10.250.660.040,00	96,43

. Belanja Barang dan Jasa

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.375.098.874,00 terealisasi sebesar Rp. 3.254.415.559,00 atau 96,42%. Rincian atas jumlah Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Belanja Barang dan Jasa	3.375.098.874,00	3.254.415.559,00	96,42
	Jumlah	3.375.098.874,00	3.254.415.559,00	96,42

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.768.206.764,00 Terealisasi pengeluaran sebesar Rp.10.259.660.040,00 atau 96,43 %. Realisasi tersebut merupakan 96,43% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp,	Rp.	
I	Belanja Langsung			
1	Gaji dan Tunjangan	4.533.875.940,00	4.364.986.004,00	96,27
2	Tambahan Penghasilan PNS	6.013.618.000,00	5.823.074.036,00	96,83
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASNBelanja Penghasilan			
3	PNS	82.890.000,00	62.600.000,00	75,52
	Jumlah	10.630.383.940,00	10.250.660.040,00	96,43

1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.375.098.874,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 3.254.415.559,00 atau 96,42. Realisasi tersebut merupakan 96,43% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%
		Rp,	Rp.	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	313.863.395,00	387.104.761,00	91,47
2	Belanja Jasa Kantor	2.265.768.160,00	2.494.434.172,00	97,22

	3	Belanja Pemeliharaan	217.278.311,00	201.062.730,00	92,54
Ī		Belanja Perjalanan Dinas dalam			
L	4	negeri	150.454.000,00	133.773.100,00	96,22
Ī					
	5	Belanja luran Jaminan/Asuransi	127.735.008,00	127.040.796,00	99,46
Ī	•				
		Jumlah :	3.375.098.874,00	3.254.415.559,00	96,42

Belanja Modal

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.444.545,00 atau 99,44%. Rincian atas jumlah Belanja Modal sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Belanja Modal	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44
	Gedung dan Bangunan			
	Jumlah	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44

5.1.3. Surflus (Defisit) LRA

Dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Tahun 2022 Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengalami Defisit sebesar Rp.13.604.520.144,00

5.2 LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan-LO merupakan Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali atau timbulnya piutang.

Jumlah Pendapatan-LO Dinas Pariwisata Provinsi Bali. dalam Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00.- terealisasi sebesar Rp.176.020.000,00.

BEBAN

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Tahun 2022 sebesar Rp.13.738.874.666,00 dengan Rincian sebagai berikut:

1. Beban Operasi

Rincian atas jumlah Beban Operasi Tahun 2022 sebagai berikut:

URAIAN		TAHUN 2022
BEBAN		
BEBAN OPERASI		
Beban Pegawai	Rp.	10.226.046.975,00
Beban Barang dan Jasa	Rp.	3.313.599.550,00
Beban Lain-lain	Rp.	4.600.000,00
Jumlah Beban Operasi	Rp	13.544.246.525,00

Beban Pegawai

Beban Pegawai Terealisasi sebesar Rp.10.226.046.975,00 atau 75,51% dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi
Beba	n Pegawai.	
1	Beban Gaji dan Tunjangan	Rp. 4.366.316.863,00
2	Beban Tambahan Penghasilan Pegawai	Rp. 5.797.130.112,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN	
Jum	ah Beban Pegawai	Rp 10.226.046.975,00

Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 3.313.599.550,00 atau 24,49% dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari:

No	Uraian		Realisasi
Beba	n Barang dan Jasa		
1	Beban Barang	Rp.	370.560.574,00
2	Beban Jasa	Rp.	2.622.839.706,00
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan	Rp.	95.365.766,00
	Mesin		
4	Beban Pemeliharaan Gedung dan	Rp.	76.600.300,00
	Bangunan		
5	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan	Rp.	3.460.104,00
	dan Irigasi		
9	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp.	144.773.100,00
Jum	ah Beban Barang dan Jasa	Rp.	3.313.599.550,00

Beban lain-lain

Beban Lain-lain Terealisasi sebesar Rp.4.600.000,00 atau 0,04% dari beban operasi secara keseluruhan.:

1.4. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan dan Amortisasi bertambah sebesar Rp.194.626.141,00 atau 1,44 % dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian		Bertambah
Beba	n Penyusutan Aset Tetap		
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp.	161.283.603,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp.	26.005.359,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan	Rp.	7.339.179,00
	Jaringan		
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp.	0,00
5	Beban Penyusutan Konstruksi dalam	Rp.	0,00
	Pengerjaan		
Jum	lah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	194.628.141,00

1.2.3. SURFLUS (DEFISIT) LO

Dari Pendapatan-LO dan Beban selama periode Tahun 2022, Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengalami Defisit Operasional sebesar Rp. (13.562.854.666,00)

NERACA

ASET

1. Aset Lancar.....Rp. 31.867.523,00

a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah Rp. 0,00 karena Kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 16.379.440,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2022 yang terdiri dari:

Saldo awal Bulan tanggal 1 Desember 2022 Rp. 99.301.824,00

 Jumlah Penerimaan
 Rp. 1.190.255.343,00

 Jumlah pengeluaran
 Rp. 1.289.557.167,00

Jumlah Saldo Akhir bulan tanggal 31 Desember 2022 Rp 0,00

Jumlah di atas telah sesuai dengan Laporan Penutupan Kas Bulanan tanggal 31 Desember 2022 dan rekening koran bank.

b.Persediaan Rp 31.867.523,00

Jumlah saldo persediaan per 31 Desember 2022 terdiri dari :

No	Uraian		Jumlah
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	21.687.879,00
2	Persediaan Alat listrik	Rp.	669.200,00
3	Persediaan Kertas dan Cover	Rp.	3.054.244,00
4	Persediaan bahan Komputer	Rp.	0,00
5	Persediaan Benda Pos	Rp.	2.136.000,00
6	Persediaan untuk dijual/diserahkan	Rp.	0,00
	kepada masyarkat		
7	Persediaan bahan untuk kantor lainnya	Rp.	227.200,00
8	Persediaan Obat-obatan	Rp.	0,00
9.	Persediaan Bahan bakar dan Pelumas	Rp.	4.093.000,00
Jum	ahPersediaan	Rp.	31.867.523,00

Rincian lebih lanjut mutasi dan nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 4

1. Aset Tetap

a. Tanah

Saldo Aset Tetap tanah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.6.155.360.000,00 Rincian Mutasi aset tanah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Mutasi Aset Tetap Tanah s.d 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut

No	Uraian		Jumlah
1	Mutasi Tanah Tahun 2021:	Rp.	6.155.360.000,00
2	Saldo Awal Tahun 2022	Rp.	6.155.360.000,00
3	Penambahan Tahun 2022		
	Koreksi Nilai Aset Tanah	Rp	,00
4	Pengurangan:	Rp.	,00
	Ke OPD Lain		
Saldo	Saldo Akhir Tanah sd. 31 Desember 2022.		6.155.360.000,00

b Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.231.507.792,00 Rincian peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Mutasi Peralatan dan Mesin	3.360.491.620,00
	Tahun 2022 :	
2.	Saldo Awal Tahun 2022	3.360.491.620,00
3.	Penambahan Tahun 2022	83.959.900,00
	a. Pengadaan Belanja Modal	0,00
	b. Mutasi Non Belanja Modal	0,00
	c. Dari OPD lain	3.350.000,00
	d. Hibah	80.609.900,00
4	Pengurangan	212.943.728,00
	a. Dibawah Kapitalisasi .	5.950.000,00
	b. Dikoreksi ke Aset Tetap	0,00
	c. Ke Aset Lainnya	206.993.728,00
	d. Ke OPD lain	0,00

Saldo Akhir Peralatan dan Mesin sd. 31	3.231.507.792,00
Desember 2022	

- Aset Tetap Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp. 83.959.900 diperoleh dari Hibah yaitu :
 - a. Mutasi dari OPD Lain:
 - Kursi Meubel = Rp. 3.350.000,00
 Sesuai Berita Acara No.B.08.028/12337/UMUM/SETWAN,Tg.
 Mei 2022 dan B.08.028/25519/UMUM/SETWAN, Tgl.26
 September 2022
 - b. Hibah (Alat Kantor dan Rumah tangga) = Rp.80.609.900Sesuai Berita Acara
 - c. Hibah (Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar) = Rp. 16.489.300,00 Sesuai Berita Acara.
 - 2. Aset Tetap Peralatan dan Mesim berkurang sebesar Rp.
 - a. Dibawah ke Kapitalisasi Rp.5.950.000,00
 - b. Ke Aset Lainnya Rp. 206.993.728,00

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.493.928.545,00 Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian		Jumlah
1	Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2022 :	Rp.	1.277.838.900,00
2	Saldo Awal Tahun 2022	Rp.	1.277.838.900,00
3	Penambahan Tahun 2022	Rp.	216.089.645,00
4	Pengurangan Tahun 2022 (Hibah)	Rp.	,00
Sale	do Akhir Gedung dan Bangunan sd. 31	Rp.	1.493.928.545,00
Des	sember 2022		

e. Jalan, Jaringan dan Instalasi.

Instalasi Listrik dan Telepon

Saldo Ahkir Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 190.834.765,00 Rincian Mutasi aset Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian		Jumlah
1	Mutasi Jalan, Jaringan dan Instalasi Tahun 2022 :	Rp.	165.198.205,00
2	Saldo Awal Tahun 2022	Rp.	165.198.205,00
3	Penambahan Tahun 2022	Rp.	25.636.560,00
4	Di bawa Ekstrakompatabel	Rp.	,00,
	do Akhir Jalan, Jaringan dan Instalasi sd. Desember 2022	Rp.	190.834.765,00

f. Aset Tetap Lainnya.

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan.

Saldo Aset Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 45.232.000,00 Rincian Mutasi aset Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Barang Bercorak Keseni	an, Rp. 45.232.000,00
	Kebudayaan Tahun 2022 :	
2	Saldo Awal Tahun 2022	Rp. 45.232.000,00
3	Penambahan Tahun 2022	Rp. 0,00

4 Pengurangan Tahun 2022					Rp.	0,00	
			•	Bercorak ember 2022		Rp.	45.232.000,00

2. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2021, dihitung dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD, disajikan dengan perhitungan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 dan Penyusutan murni Tahun 2022 dengan Rincian sebagai berikut :

		Rincian						
N	Uraian	Saldo Audited	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir			
0.		Januari 2022	2022	2021				
1	Akumulasi							
	penyusutan	3.087.548.008,00	0,00	43.710.125,00	3.043.837.883,00			
	Peralatan dan							
	Mesin							
2	Akumulasi							
	Penyusutan	524.884.721,00	46.026.184,00	0,00	570.910.905,00			
	Gedung dan							
	Bangunan							
3	Akumulasi							
	PenyusutanJal	50.801.568,00	7.339.179,00	0,00	58.140.747,00			
	an, Irigasi dan							
	Jaringan							
4	Akumulasi							
	Penyusutan	45.232.000,00	0,00	0,00	45.232.000,00			
	Aset Tetap							
	Lainnya							

5	Akumulasi				
	Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konstruksi				
	dalam				
	Pengerjaan				
6	Akumulasi				
	Penyusutan	0,00	11.578.000,00	11.578.000,00	0,00
	Aset lainnya				
Jun	nlahAkumulasi	3.708.466.297,00	64.943.363,00	55.288.125.00	3.718.121.535,00
Pen	yusutan				,

3. Aset Lainnya

Saldo Aset Barang Kondisi Rusak Berat sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.11.578.000,00 Rincian Mutasi aset Barang Kondisi Rusak Berat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian		Jumlah
Mut	asi Aset Lainnya Tahun 2022 :	Rp.	11.578.000,00
1	Saldo Awal Tahun 2022	Rp.	0,00
2	Penambahan Tahun 2022	Rp.	11.578.000,00
3	Pengurangan	Rp.	0,00
Salo 202	do Akhir Aset Lainnya sd. 31 Desember	Rp.	11.578.000,00

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Sampai dengan 31 Desember 2022 dan pada tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 1. (Berita Acara Rekonsiliasi Internal)

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

Rp.442.482.047,00

a. Utang PFK

Rp. 0,00

Jumlah tersebut merupakan pajak-pajak yang sudah disetor oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Pemungutan	Penyetoran	Saldo
1	PPh Pasal 21	540.288.672,00	540.288.672,00	-
2	PPh Pasal 22	1.401.440,00	1.401.440,00	-
3	PPh Pasal 23	10.924.930,00	10.924.930,00	-
4	PPN	74.927.273,00	74.927.273,00	-
5	PPh Pasal 4	3.135.638,00	3.135.638,00	-
	Ayat 2			
Jum	lah	630.677.953,00	630.677.953,00,00	

b. Uang Muka Dari Kas Daerah Rp. 0,00

Tidak ada Uang Muka dari Kas Daerah karena sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2022, sesuai dengan STS.No.B.20.900/6387/SEKRET/DISPAR sebesar Rp. 16.379.440,00 sehingga pada tanggal 31 Desember 2021 Kas Pada Bendahara Pengeluaran Nihil.

c. Utang Belanja

Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali terjadi Utang Belanja sebesar Rp. 457.733.905,00 yang terdiri dari **Utang Belanja Langsung** Tahun 2022 yaitu:

1. Utang Belanja Langsung Sebesar Rp. 457.733.905,00 Terdiri dari :

I. Barang dan Jasa (Listrik, Telepon, Air dan Faximile)

Yaitu:

a. Utang Belanja Listrik Rp. 6.057.027,00

b. Utang Belanja Telepon Rp. 237.533,00

c. Utang Belanja Air Rp. 1.850.775,00

ii. Belanja Pegawai

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja Rp.173.466.978,00
- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi KerjaRp.260.200.472,00
- c. Iuran BPJS Kesehatan 4 % Rp. 12.667.723,00
- d. Kekurangan Gaji Pokok PNS Rp. 1.656.202,00
- e. BPJS Gaji induk PNS Rp. 1.596.248,00
- f. Pembulatan Gaji PNS Rp. 947,00

Yang nantinya akan di bayar pada Tahun Anggaran 2023

EKUITAS

Jumlah Ekuitas Dinas Pariwisata adalah sebesar Rp.6.986.621.354,00 Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih per 31 Desember 2022.

Rincian mutasi Ekuitas Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
	Oalla Eleitaa Assal Talasa	D	0.000.005.500.00	0.000.005.500.00
1.	Saldo Ekuitas Awal Tahun	Rp.	6.929.995.532,00	6.929.995.532,00
	2022			
2.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	(13.562.854.666,00)	0,00

3.	DAMPAK KUMULATIF			
	PERUBAHAN			
	KEBIJAKAN/KESALAHAN	Rp.	0,00	0,00
	MENDASAR	Rp.	(2.000.000,00	0,00
	Koreksi Nilai Pendapatan LO		3.214.175,00	
	Koreksi Nilai Aset Tetap OPD			
4.	RK PPKD	Rp.	13.604.520.144,00	0,00
Sale	do Ekuitas Akhir 31	Rp.	6.972.875.185,00	6.929.995.532,00
Des	sember 2021			

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Dinas Pariwisata Provinsi Bali per 31 Desember 2022 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2022.

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kebijakan Kapitalisasi aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga melaksanakan Penyusutan atas aset tetap sampai dengan Tahun 2019 sehingga berpengaruh terhadap Ekuitas. Dengan terbitnya IPSAP 04 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Penyajian kembali laporan keuangan Tahun 2022 tidak diperlukan sehingga pengaruh atas pelaksanaan kebijakan Kapitalisasi dan penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan pada pos dampak komulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan yang mengurangi ekuitas tahun berjalan.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

No	Uraian		Tahun 2021	Tahun 2020
1.	Saldo Ekuitas Awal Tahun 2022	Rp.	6.929.995.532,00	6.929.995.532,00
2.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	(13.562.854.666,00)	0,00
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
	KEBIJAKAN/KESALAHAN	Rp.	0,00	0,00
	MENDASAR	Rp.	(2.000.000,00)	0,00
	Koreksi Nilai Pendapatan LO		3.214.175,00	
	Koreksi Nilai Aset Tetap			
	OPD			
4.	RK PPKD	Rp.	13.604.520.144,00	0,00
Salo	do Ekuitas Akhir 31 sember 2021	Rp.	6.972.875.185,00	6.929.995.532,00

Bab VI

Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

Dalam kerangka pembangunan good government, kebijakan umum pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Bali No. 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan tersebut diatas telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Bali merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. Tugas Propok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenagan daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi. Dinas Pariwisata Provinsi Bali mempunyai fungsi sebagai berikut:

Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;

Penyelenggaraan Administrasi Dinas Bidang Pariwisata; 1.3.1.1.1.4

Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan Dinas; dan

Penyelenggaran Fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait oleh tugas dan fungsinya..

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Bali merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggarakan pemerintah, pelaksanakan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pariwisata Provinsi Bali, lebih lanjut bisa dilihat seperti keterangan di bawah ini :

Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah :

VISI GUBERNUR BALI

"Nangun Sat Kethi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru".

MISI GUBERNUR BALI TERKAIT PARIWISATA

- 1. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota Se-Bali.
- Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
- 3. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah mewujudkan keterpaduan arah kebijakan pembangunan Pariwisata Nasional maupun daerah sesuai dengan Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 dan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Provinsi Bali.

Sasaran adalah meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas, meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global dan meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang dituangkan melalui Misi Gubernur dalam Rencana Strategik Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dapat dilihat dibawah ini :

- Misi 13 : Mengembangkan Destinasi dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya dan Berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/Kota Se Bali.
 - Tujuannya adalah berkembangnya destinasi produk Pariwisata budaya berbasis komunitas.
 - Sasarannya adalah meningkatnya kualitas destinasi pariwisata Budaya Berbasis Komunitas dan berkembangnya produk Pariwisata Kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- Misi 14 : Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali di Dalam dan di Luar Negeri secara bersinergi antar Kabupaten/Kota Se Bali dengan mengembangkan kreatifitas enovasi.
 - Tujuannya meningkatnya pasar pariwisata bali
 - Sasarannya adalah meningkatnya pasar Pariwisata Bali domestik dan global.

Misi 15 : Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif

- **Tujuannya** adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan
- Sasarannya adalah Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan dan meningkatnya kwalitas SDM Pariwisata.

KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam kebijakan yang mengacu pada Rencana Strategik Kerja Dinas

pariwisata Provinsi Bali tahun 2018-2023 Adapun Arah Kebijakan Dinas pariwisata Provinsi Bali adalah :

- 1. Pengembangan infratruktur yang terintegrasi untuk mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru.
- 2. Mengembangkan inovasi dan kreatifitas yang efektif untuk Promosi Pariwisata.
- 3. Meningkatkan daya saing industri Pariwisata dan sinergitas berbagai komponen Pariwisata.

Keberhasilan pelaksanaan suatu misi dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, ditentukan oleh beberapa faktor penentu keberhasilan yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor lingkungan, baik yang bersifat internal dan bersifat eksternal.

Dari analisis lingkungan yang telah dilakukan sesuai dengan yang diuraikan pada Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka dapat dirumuskan beberapa faktor penentu keberhasilan sebagai berikut:

- Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan handal dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi;
- 2. Adanya keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan antar daerah yang berwawasan lingkungan, dan karena keterbatasan sumber daya alam maka dituntut pelestariannya melalui berbagai upaya pengaturan dan peningkatan diversifikasi sehingga ekosistem tetap terpelihara.
- 3. Keberdayaan desa pekraman dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya Bali yang mengandung nilai religius, estetika solidaritas, harmonis dan keseimbangan yang menjiwai perilaku sosial dalam rangka ketahanan struktural yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.
- 4. Kemampuan mempromosikan/ memasarkan produk wisata dalam suasana global dengan persaingan yang semakin ketat. Kuantitas dan kualitas produk harus mampu menembus produk harus mampu menembus pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.

- 5. Adanya kerjasama yang harmonis antara unsur pemerintah, industri pariwisata atau sektor swasta dan masyarakat.
- 6. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kepariwisataan yang sejalan dengan tuntutan perkembangan baik ilmu pengetahuan dan teknologi maupun aspirasi masyarakat.
- 7. Mantapnya pelaksanaan otonomi daerah yang didukung oleh kerjasama yang saling menguntungkan baik antar daerah, regional maupun bersifat internasional.

Selanjutnya Dinas Pariwisata Provinsi Bali pada tahun anggaran 2020 telah berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 7 (tujuh) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam ringkasan eksekutif diatas. Untuk lancarnya pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi diatas Dinas Pariwisata Provinsi Bali didukung oleh 116 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali berdasarkan pangkat, golongan, eselon dan tenaga harian lepas adalah :

Pangkat/Golongan IV/d: - orang

Pangkat/Golongan IV/c : - orang

Pangkat/Golongan IV/b : 2 orang

Pangkat/Golongan IV/a: 9 orang

Pangkat/Golongan III/d: 14 orang

Pangkat/Golongan III/c: 7 orang

Pangkat/Golongan III/b : 6 orang

Pangkat/Golongan III/a: 11 orang

Pangkat/Golongan II/d: 0 orang

Pangkat/Golongan II/c : 2 orang

Pangkat/Golongan II/b : 1 orang

Pangkat/Golongan II/a: - orang

Pangkat/Golongan I/d : - orang

Pangkat/Golongan I/c : - orang

Pangkat/Golongan I/b : - orang
Pangkat/Golongan I/a : - orang
Pegawai Kontrak : 60 orang

Jumlah : 112 orang

DAFTAR JENIS SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

PER 1 JANUARI 2022

FORMAT 2022

	Uraian	Data PP. Keuangan	BA. Stock Opname Pengurus Barang	Selisih
1.1.12.	Persediaan	115,323,336.00	115,323,336.00	0.00
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	115,323,336.00	115,323,336.00	0.00
1.1.12.01.01.	Bahan	82,756,500.00	82,756,500.00	0.00
1.1.12.01.01.0001.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	.,,	,,	0.00
1.1.12.01.01.0002.	Bahan Kimia			0.00
1.1.12.01.03.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	26,172,086.00	26,172,086.00	0.00
1.1.12.01.03.0001.	Alat Tulis Kantor	14,162,717.00	14,162,717.00	0.00
1.1.12.01.03.0002.	Kertas dan Cover	5,688,000.00	5,688,000.00	0.00
1.1.12.01.03.0003.	Bahan Cetak	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0004.	Benda Pos	3,327,000.00	3,327,000.00	0.00
1.1.12.01.03.0005.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			0.00
1.1.12.01.03.0006.	Bahan Komputer	977,300.00	977,300.00	0.00
1.1.12.01.03.0007.	Perabot Kantor			0.00
1.1.12.01.03.0008.	Alat Listrik	1,449,069.00	1,449,069.00	0.00
1.1.12.01.03.0009.	Perlengkapan Dinas			0.00
1.1.12.01.03.0010.	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa			0.00
1.1.12.01.03.0011.	Perlengkapan Pendukung Olahraga			0.00
1.1.12.01.03.0012.	Suvenir/Cendera Mata		0.00	0.00
1.1.12.01.03.0013.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	568,000.00	568,000.00	0.00
1.1.12.01.04.	Obat-obatan	56,000.00	56,000.00	0.00
1.1.12.01.04.0001.	Obat			0.00
1.1.12.01.04.0002.	Obat-obatan Lainnya	56,000.00	56,000.00	0.00
1.1.12.01.05.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	6,338,750.00	6,338,750.00	0.00
1.1.12.01.05.0001.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	6,338,750.00	6,338,750.00	0.00
1.1.12.01.05.0002.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya			0.00
1.1.12.01.06.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.06.0001.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga			0.00
1.1.12.01.06.0002.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya			0.00
1.1.12.01.07.	Natura dan Pakan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.07.0001.	Natura			0.00
1.1.12.01.07.0002.	Pakan			0.00
1.1.12.01.07.0003.	Natura dan Pakan Lainnya			0.00
1.1.12.01.08.	Persediaan Penelitian	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.08.0001.	Persediaan Penelitian Biologi			0.00
1.1.12.01.08.0002.	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya			0.00
1.1.12.01.08.0003.	Persediaan Penelitian Teknologi			0.00
1.1.12.01.08.0004.	Persediaan Penelitian Lainnya			0.00
1.1.12.01.09.	Persediaan dalam Proses	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.09.0001.	Persediaan Dalam Proses			0.00
1.1.12.01.09.0002.	Persediaan Dalam Proses Lainnya			0.00
1.1.12.02.	Barang Tak Habis Pakai	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.	Komponen	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.	Pipa	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.	Barang Bekas Dipakai	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.0001.	Komponen Bekas			0.00
1.1.12.03.01.0002.	Pipa Bekas			0.00
1.1.12.03.01.0003.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya			0.00
		1		

Denpasar, 1 JANUARI 2022

Pejabat Penatausahaan Barang,

Pejabat Penatausahaan Barang,

Rusma Primayanthi,SS NIP. 19850708 200802 2 001 Luh Putu Darmiasih,SE NIP.19830415 201001 2 005

DAFTAR MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN BARANG

DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022

		Data Pejabat Penatausahaan Keuangan			Data Pejabat Penatausahaan Barang				
			Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD	Pembelian	Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD
1.1.12.	Persediaan	287,104,761	0.00	0.00	0.00	287,104,761	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	287,104,761	0.00	0.00	0.00	287,104,761	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.	Bahan	143,585,250	0.00	0.00	0.00	143,585,250	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.0001.	Bahan Bangunan dan Konstruksi								
1.1.12.01.01.0002.	Bahan Kimia								
1.1.12.01.01.0004.	Bahan Bakar dan Pelumas	143,585,250	0.00	0.00	0.00	143,585,250	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.	Suku Cadang	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0001.	Suku Cadang Alat Angkutan					0			
1.1.12.01.03.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	122,198,511	0.00	0.00	0.00	122,198,511.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0001.	Alat Tulis Kantor	30,469,516	0.00	0.00	0.00	30,469,516			
1.1.12.01.03.0002.	Kertas dan Cover	16,346,044.00	0.00	0.00	0.00	16,346,044.00			
1.1.12.01.03.0003.	Bahan Cetak	0	0.00	0.00	0.00	0			
1.1.12.01.03.0004.	Benda Pos	3,360,000	0.00	0.00	0.00	3,360,000			
1.1.12.01.03.0005.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.12.01.03.0006.	Bahan Komputer	15,174,656.00	0.00	0.00	0.00	15,174,656.00			
1.1.12.01.03.0007.	Perabot Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.12.01.03.0008.	Alat Listrik	3,085,295	0.00	0.00	0.00	3,085,295			
1.1.12.01.03.0009.	Perlengkapan Dinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.12.01.03.0013.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	53,763,000.00	0.00	0.00	0.00	53,763,000.00			
1.1.12.01.04.	Obat-obatan	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.04.0001.	Obat	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.04.0002.	Obat-obatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.12.01.05.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	21,321,000.00	0.00	0.00	0.00	21,321,000.00	0.00		0.00
1.1.12.01.05.0001.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	21,321,000.00	0.00	0.00	0.00	21,321,000.00	0.00		0.00
1.1.12.01.05.0002.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.12.01.06.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.06.0001.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.06.0002.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya								
1.1.12.01.07.	Natura dan Pakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.07.0001.	Natura								
1.1.12.01.07.0002.	Pakan								
1.1.12.01.07.0003.	Natura dan Pakan Lainnya								
1.1.12.01.08.	Persediaan Penelitian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.08.0001.	Persediaan Penelitian Biologi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.09.	Persediaan dalam Proses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.09.0001.	Persediaan Dalam Proses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.09.0002.	Persediaan Dalam Proses Lainnya								
1.1.12.02.	Barang Tak Habis Pakai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.	Komponen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.0001.	Komponen Jembatan Baja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.0002.	Komponen Jembatan Pratekan								
1.1.12.02.01.0003.	Komponen Peralatan								
1.1.12.02.01.0004.	Komponen Rambu-Rambu								
1.1.12.02.01.0005.	Attachment								
1.1.12.02.01.0005.	Komponen Lainnya								
1.1.12.02.01.0000.	Pipa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.0001.	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
1.1.12.03.	Barang Bekas Dipakai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.0001.	Komponen Bekas	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
1.1.12.03.01.0001.	Pipa Bekas								
1.1.12.03.01.0002.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya								
1.1.12.03.01.0003.	nomponen sekas dan ripa sekas tanniya	1						+	
		j.		ļ					

Denpasar, 31 Desember 2022

Pejabat Penatausahaan Barang,

Pejabat Penatausahaan Barang,

Rusma Primayanthi,SS NIP.19850708 200802 2 001 Luh Putu Darmiasih NIP. 19830415 201001 2 005

DAFTAR MUTASI KURANG PERSEDIAAN BARANG DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022

Uraian				Data PP. Keuangan					Data PP. Barang		
		Pemakaian Normal	Beri Hibah	Daluwarsa/Rusak	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD	Pemakaian Normal	Beri Hibah	Daluwarsa/Rusak	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD
1.1.12.	Persediaan	370,504,574	0.00	0.00	0.00	0.00	370,560,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	370,504,574	0.00	0.00	0.00	0.00	370,560,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.	-	222,248,750	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Bahan Bangunan dan Konstruksi	, , , , , ,					, ,, ,, ,,				
	Bahan Kimia										
1.1.12.01.01.	Bahan Bakar dan Pelumas	222,248,750					222,248,750				
1.1.12.01.02.	Suku Cadang	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.	Suku Cadang Alat Angkutan						0				
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	120,596,074	0.00	0.00	0.00	0.00	120,596,074	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alat Tulis Kantor	22,944,354					22,944,354				
	Kertas dan Cover	18,979,800.00					18,979,800.00				
	Bahan Cetak						0				
1.1.12.01.03.		4,551,000					4,551,000				
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1,001,000					0.00				
	Bahan Komputer	16,151,956.00					16,151,956.00				
	Perabot Kantor	., . ,					., . ,				
1.1.12.01.03.		3,865,164.00					3,865,164.00				
	Perlengkapan Dinas	0.00					0.00				
	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0.00					0.00				
	Perlengkapan Pendukung Olahraga										
	Suvenir/Cendera Mata						0.00				
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	54,103,800.00					54,103,800				
	Obat-obatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.04.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obat-obatan Lainnya	56,000.00					56,000.00				
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	27,659,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,659,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	27,659,750.00		3.22			27,659,750.00				
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	27,039,730.00					27,039,730.00				
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya										
	Natura dan Pakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.09.	Persediaan dalam Proses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Persediaan Dalam Proses										
	Persediaan Dalam Proses Lainnya										
	Barang Tak Habis Pakai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Komponen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Komponen Jembatan Baja										
1.1.12.02.02.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.	Pipa Air Besi Tuang (DCI)										
	Barang Bekas Dipakai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Komponen Bekas										
1.1.12.03.01.											
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya										
					·						

Denpasar, 31 Desember 2022

Pejabat Penatausahaan Barang,

Pejabat Penatausahaan Barang,

Rusma Primayanthi,SS NIP.19850708 200802 2 001 Luh Putu Darmiasih,SE NIP. 19680415 201001 2 005

DAFTAR IENIS SALDO AKHIR PERSEDIAAN BARANG

DINAS DADIMISATA DECVINSI RAL

PFR 31 Desember 2022

	Uraian	Data PP. Keuangan	BA. Stock Opname Pengurus Barang	Selisih
1.1.12.	Persediaan	31,923,523.00	31,867,523.00	0.00
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	31,923,523.00	31,867,523.00	0.00
1.1.12.01.01.	Bahan	4,093,000.00	4,093,000.00	0.00
1.1.12.01.01.0001.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.0002.	Bahan Kimia	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.0004.	Bahan Bakar dan Pelumas	4,093,000.00	4,093,000.00	0.00
1.1.12.01.02.	Suku Cadang	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0001.	Suku Cadang Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	27,774,523.00	27,774,523.00	0.00
1.1.12.01.03.0001.	Alat Tulis Kantor	21,687,879.00	21,687,879.00	0.00
1.1.12.01.03.0002.	Kertas dan Cover	3,054,244.00	3,054,244.00	0.00
1.1.12.01.03.0003.	Bahan Cetak	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0004.	Benda Pos	2.136.000.00	2.136.000.00	0.00
1.1.12.01.03.0005.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0006.	Bahan Komputer	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0007.	Perabot Kantor	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0007.	Alat Listrik	669,200.00	669,200.00	0.00
1.1.12.01.03.0009.	Perlengkapan Dinas	0.00	003,200.00	0.00
1.1.12.01.03.0003.	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0010.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0011.	Suvenir/Cendera Mata	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0012.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	227,200.00	227,200.00	0.00
1.1.12.01.03.0013.	Obat-obatan	56,000.00	0.00	0.00
1.1.12.01.04.	Obat-obatan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.04.0001.	Obat-obatan Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.04.0002. 1.1.12.01.05.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0.00	0.00	0.00
	• •		0.00	
1.1.12.01.05.0001.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.05.0002. 1.1.12.01.06.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0.00	0.00	0.00
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga			
1.1.12.01.06.0001.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.06.0002.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.07.	Natura dan Pakan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.07.0001.	Natura	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.07.0002.	Pakan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.07.0003.	Natura dan Pakan Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.08.	Persediaan Penelitian	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.08.0001.	Persediaan Penelitian Biologi	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.09.	Persediaan dalam Proses	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.09.0001.	Persediaan Dalam Proses	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.09.0002.	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.	Barang Tak Habis Pakai	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.	Komponen	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.0001.	Komponen Jembatan Baja	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.	Pipa	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.0001.	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.	Barang Bekas Dipakai	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.0001.	Komponen Bekas	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.0002.	Pipa Bekas	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.0003.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0.00	0.00	0.00

Denpasar, 31 Desember 2022

Pejabat Penatausahaan Barang,

Pejabat Penatausahaan Barang,

<u>Rusma Primayanthi,SS</u> NIP.19850708 200802 2 001 <u>Luh Putu Darmiasih,SE</u> NIP. 19830415 201001 2 005